

**KONSEP *TAWASSUṬ* MENURUT NAHDLATUL ULAMA (NU)
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPUTUSAN-KEPUTUSAN
ORGANISASI DALAM BIDANG SOSIAL, POLITIK DAN
KEAGAMAAN**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Pemikiran Islam**



**Oleh:
AKHMAD IKHSAN
Nim. FO.0.4.10.24**

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2012**

Pada tanggal 12 September 2012

1. Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, M.A (Ketua)
2. Dr. Masdar Hilmy, MA. Ph.D (Penguji)
3. Prof. Dr. H. Ma'sum, M. Ag (Penguji)

Direktor,



Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, M. A
NIP.195008171981031002

ABSTRAK

Akhmad Ikhsan. (2012) “Konsep *Tawassut* Menurut Nahdlatul Ulama (Nu) Dan Implikasinya Terhadap Keputusan-Keputusan Organisasi Dalam Bidang Sosial, Politik Dan Keagamaan”.

Kata Kunci: *Tawassut*, Nahdlatul Ulama (Nu).

Penelitian tentang “Konsep *Tawassut* Menurut Nahdlatul Ulama (NU) dan Implikasinya Terhadap Keputusan-Keputusan Organisasi dalam Bidang Sosial, Politik dan Keagamaan” merupakan penelitian yang mengambil fokus tentang 1) Definisi *Tawassut* 2) Kondisi sosial, keagamaan dan politik saat kemunculan organisasi NU, 3) Implikasi konsep *tawassut* pada organisasi Nahdlatul Ulama (NU) di bidang sosial, keagamaan dan politik.

Tawassut merupakan pengambilan sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrim kiri atau kanan atau disebut sikap moderat. Penelitian konsep tawassut ditujukan terhadap Program dan Kebijakan NU

Karena penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*descriptif research*), maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model studi pustaka.

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap *tawassut* yang dipilih oleh NU berawal dari nilai-nilai teologi ash'arisme yang tidak terlalu ekstrim kanan, dalam terminologi radikal, atau kiri, dari tradisi liberalis. Tawasut NU adalah sikap moderatisme yang memberikan ruang dialog terbuka kepada pemikiran yang berbeda-beda.

Kondisi sosial, saat kelahiran NU ditandai dengan merebaknya kekuatan sosial baru yang hadir di Indonesia, semisal para pembaharu Islam dan kelompok Wahabi. Sementara kebiasaan masyarakat Jawa untuk menjaga tradisi yang sangat kuat, dihantui oleh isu purifikasi keyakinan. Di bidang politik, kelompok-kelompok tradisional Islam mulai disingkirkan oleh kaum muda. Oleh sebab itulah NU hadir sebagai pemberi jalan tengah, yang ingin tetap menjaga keutuhan nilai tradisi dan tidak alergi untuk memperbaharui pemikiran Islam.

Implikasi *tawassuf* di *Bidang Sosial*, NU lebih mengedepankan cara-cara yang elegan dalam berdakwah, tidak memaksakan kehendak. Di bidang pendidikan, NU memadukan tradisionalisme pesantren dan pendidikan umum. Di *Bidang Keagamaan*, NU menjadikan pondok pesantren sebagai transmisi keislaman dan keilmuan Islam (fiqh, tasawuf, aqidah, dll) yang berkarakter NU. *Bidang politik*, NU sudah menempati beberapa posisi politik di negara ini; pendukung NKRI, menjadi bagian sistem pemerintahan, keluar dan masuk kembali melalui partai bentukan dan kader afiliasi dengan NU, yang menunjukkan politik NU memiliki kelenturan, moderatisme, dan tidak selalu mendukung pemerintah, atau sebaliknya, *vis a vis* dengan pemerintah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
TRANSLITERASI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
1. Identifikasi Masalah	7
2. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	12
2. Data dan Sumber Data.....	13
3. Inventarisir Data.....	14
4. Teknik Analisis Data.....	14
H. Sistematika Bahasan.....	15

BAB II *TAWĀSUT* DAN HOLISME NILAI NAHDLATUL ULAMA (NU) .. 17

A.	Pemaknaan <i>Tawāsuf</i>	17
1.	Bidang Aqidah	20
2.	Bidang Syariah.....	20
3.	Bidang Tasawuf Akhlaq	20
4.	Bidang Kebudayaan.....	22
5.	Bidang Dakwah.....	22
B.	Nahdlatul Ulama' dan Keyakinan <i>Ahl al-sunnah wa al-jamā'ah</i>	26
1.	Polarisasi Sejarah, Ajaran, dan Nilai-Nilai Ke-Aswaja-an	26
2.	Kelahiran Nahdlatul Ulama'	38
C.	Profil Singkat Abu Musa al Asy'ari dan KH. Hasyim Asy'ari	47
1.	Biografi Abu Hasan al-Asy'ari (260-330H/873-947M).....	47

PENDAHULUAN

Ada keyakinan akademik bahwa pola perilaku umat Islam – dari dulu hingga sekarang – sangat dipengaruhi oleh interpretasi otoritas keberagamaan mereka, baik itu individu maupun organisasi faham keberagamaan. Paul Gifford, dalam Hinnels, mengatakan bahwa hampir semua agama memiliki otoritas keberagamaan yang memiliki hak untuk menafsirkan atau menginterpretasi kandungan ajaran-ajaran (*scripture*), mentradisikan, dan memiliki kharisma tinggi sehingga diikuti oleh para pengikutnya.¹ Kondisi ini sangat jelas terlihat di dalam agama Islam. Dimulai dari dimensi sejarah kebudayaan Islam, dimana para *firqah* atau aliran keberagamaan sangat kuat dengan tradisi ketokohan mereka masing-masing. Dalam tradisi Islam Shi'ah misalnya, mereka memiliki Mulla atau Imam yang berhak untuk memberikan fatwa yang akan melandasi tindakan para pengikutnya. Atau dalam tradisi Sunni, mereka punya *Ulama'* atau *mufti al a'dham*, yang punya kekuatan otoritatif untuk melegitimasi atau mendelegitimasi ajaran tertentu. Dan, di beberapa aliran-aliran lainnya.

Begitu juga yang terjadi di dalam tradisi Islam-Indonesia.² Secara otoritas organisasional, umat Islam di Indonesia terpecah menjadi dua kekuatan budaya organisasi besar bernama; Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama'. Meskipun,

² Terminologi ini memang masih belum paten. Umumnya, para peneliti lebih suka menyebut Islam-Nusantara dibandingkan Islam-Indonesia. Tapi, penulis juga harus akui bahwa ada upaya yang sekarang sedang dirumuskan oleh para akademisi tentang konsep Islam-Indonesia ini. Misalnya lihat: Abdurrahman Mas'ud, Ali Hasan Susanto, dan karya-karya Masdar Hilmy.

Selain sebagai organisasi keberagamaan, kedua organisasi ini juga memiliki sumbangsih besar terhadap terbangunnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Meminjam istilah yang diungkapkan oleh seorang kiai di Jawa Timur, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama', sama-sama dikaruniai kelebihan-kelebihan. Muhammadiyah mampu mendirikan Sekolah /Universitas Islam dan Rumah Sakit yang mentereng untuk berkontribusi kepada bangsa Indonesia. Sedangkan, Nahdlatul Ulama' bisa membangun puluhan ribu pondok pesantren dan memperdayakan ekonomi masyarakat pedesaan dengan sangat baik.

Dari sisi model-model perilaku keberagamaan, penulis bersepakat dengan Masdar Hilmy, yang mengatakan bahwa dua organisasi asli Indonesia ini memiliki nilai-nilai modertisme keberagamaan yang sangat tinggi. *Concern* mereka tidak hanya persoalan agama, melainkan aspek-aspek lain dari berbangsa

⁴ Abdur Rouf, *NU dan Civil Islam di Indonesia* (Tangerang: PT. Intimedia Cipta Nusantara, 2010), 13

Meskipun memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perilaku keislaman di Indonesia, menghadapi dunia global yang tanpa batas ini, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' dituntut atau ditantang untuk mencari pendekatan baru sehingga bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Betapapun, suasana kebatinan umat Islam saat ini di Indonesia, dihadapkan dengan eskalasi keberagamaan yang tidak menentu. Ahmad Suaedy dkk, dari Wahid Institute Jakarta, mencatat bahwa ada ratusan kasus teror atas nama agama yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya. Baik itu menyangkut internal umat Islam, ataupun antar umat beragama. Selain itu, kuatnya politisasi agama sebagai kepentingan orang, calon, atau partai tertentu, sehingga agama mengalami demistifikasi nilai. Ditambah lagi, aliran-aliran atau organisasi keagamaan baru di dalam Islam, yang cenderung ingin merubah nilai-nilai kenegaraan menjadi satu paham tertentu.⁷ Greg Fealy dan Antony Bubalo juga memberikan rekomendasi penelitian yang sama tentang identitas keberagamaan Islam yang ada di Indonesia. Menurut dua peneliti asal Australia ini, Indonesia saat ini menghadapi tantangan transnasionalisme Islam. Baik itu yang

7 Greg Fealy & Antony Bubalo. *Jejak Kafilah*. terj. Akh. Muzakki (Bandung; Mizan, 2001), 189

Anggapan Ahmad Suaedy atau G. Fealy dan A. Bubalo di atas memang merupakan fakta persoalan yang harus ditanggapi oleh umat Islam di Indonesia. Sulit untuk mengelak bahwa ada perpecahan cara pandangan, baik dari sisi otoritas keberagamaan ataupun sikap umat Islam itu sendiri. Amin Abdullah sendiri mengakui, disaat hari ulang tahun Muhammadiyah di Jogjakarta, bahwa mereka harus mulai memikirkan kembali istilah “Islam Berkemajoean” yang diungkapkan oleh KH. Ahmad Dahlan. Tujuannya untuk membedakan sikap purifikasi keimanan orang-orang Muhammadiyah dengan kelompok baru yang mengkampanyekan dalil yang sama dengan mereka.⁹ Di akhir penelitiannya, dia mengungkapkan bahwa hal yang belum dilakukan oleh Muhammadiyah adalah mendalami kitab-kitab tradisional yang juga dilakukan oleh para pemikir progresif saat ini, seperti Abed Al Jabari, Jasser Auda, dan Abou el Fadl. Mereka semua memiliki sikap tradisionalisme keberagamaan yang kuat, meskipun secara pemikiran sangat rasional.¹⁰

Bagaimanakah dengan Nahdlatul Ulama' dalam menghadapi kondisi yang tidak menentu seperti yang diungkapkan di atas. Ahmad Baso, salah seorang pengurus PBNU, mengungkapkan bahwa tidak perlu ada yang dikhawatirkan dengan tradisi kebangsaan, keagamaan, dan keyakinan Nahdlatul Ulama'. Baginya, Nahdlatul Ulama' sudah memiliki manhaj (cara berfikir) tersendiri yang

⁹ Amin Abdullah, “Islam Berkemajocan” (Makalah Milad Muhammadiyah di Jogjakarta Tahun 2013).

[illegible]

Setidaknya, inilah salah satu contoh sikap moderatisme Nahdlatul Ulama' dalam bertindak. Organisasi yang didirikan KH. Hasyim Asy'ari ini, tidak menekankan sikap liberal (baca; bebas) yang terlalu ekstrim, begitupula sebaliknya, tidak sepenuhnya mendukung fanatisme atau konservatisme terlalu mencolok. Di dalam Nahdlatul Ulama' sendiri terlihat jelas ada maqalah yang dianggap sebagai *source of stance* (sumber prinsip bertindak), berbunyi :*"al muhafadhah 'ala qadim al saleh wa al akhdhu bi al jadid al aslah"*. (menjaga tradisi lama yang baik, dan mengambil beberapa tradisi baru yang baik). Kata-kata ini, dalam sekilas pandangan penulis, merupakan sikap moderatisme Nahdlatul Ulama' dalam seluruh bidang. Dan, yang paling penting, seringkali diimplementasikan dalam proses-proses pengambilan keputusan di Nahdlatul Ulama'.

¹¹ Ahmad Baso, *Agama NU untuk NKRI* (Jakarta pustaka afid, 2013)

Oleh sebab itulah, penulis memberi judul penelitian akhir ini “Konsep *Tawassut* Menurut Nahdlatul Ulama (NU) Dan Implikasinya Terhadap Keputusan-Keputusan Organisasi Dalam Bidang Sosial, Politik Dan Keagamaan”. Tujuannya sederhana, penulis ingin berusaha memahami konsep *Tawassut* dalam perspektif Nahdlatul Ulama dan mengetahui sumber-sumber yang digunakan, serta bagaimana mereka mengimplemetasikan sebagai pemilik otoritas-keberagamaan (organisasi).

Karena begitu luasnya karakteristik organisasi Nahdlatul Ulama' dalam bidang keagamaan, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti meliputi analisis sejarah masa Imam Abu Hasan al-Asy'ary dan sebagai pelopor ajaran keagamaan *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, sejarah Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) beserta biografi KH. M. Hasyim Asy'ari, juga yang merupakan inti dari penelitian adalah implikasi dari karakter *Tawassut* oleh NU di bidang sosial, keagamaan dan politik di Indonesia.

Secara khusus Zamakhsari Dhafir juga membahas Aswaja sebagai paham keagamaan yang dikembangkan dalam tradisi pesantren.¹⁴ Kajian yang lebih mengarah pada sudut pandang biografis KH. M. Hasyim Asy'ari dilakukan oleh Akarhanaf dalam bukunya; *Kiai Hasyim Asy'ari, Bapak Umat Islam Indonesia*.¹⁵ Tamyiz Baurhanudin juga lebih menekankan pada biografi KH. M. Hasyim Asy'ari dan Akhlaq Pesantren.¹⁶

Meskipun kajian ini secara langsung tidak berhubungan dengan tema penelitian, namun akan sangat berguna untuk melacak variabel-variabel yang dapat diduga mempengaruhi atau mendasari bangunan pemikiran dan sikap KH. M. Hasyim Asy'ari dalam memilih dan mengambil sikap *Tawassut* sebagai salah satu ciri aswaja NU di Indonesia.

¹⁶ Tamyiz Burhanudin, *Akhlaq Pesantren: Pandangan KH. M. Hasyim Asy'ari* (Ittaqa Press, 2001)

Selain penelitian yang secara spesifik menguraikan tentang pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari, juga terdapat kajian yang menekankan sudut pandang genealogis keilmuan KH. M. Hasyim Asy'ari, seperti yang dilakukan oleh Martin Van Bruinessen¹⁹, Abdurrahman Mas'ud²⁰, dan Abdul Karim Amrullah²¹. Semua kajian di atas tidak ada satu pun yang mengkaji secara khusus tentang *tawassuf* Aswaja NU. Oleh karena itu, penelitian yang terdahulu berbeda dengan kajian ini, sehingga penelitian ini menempati tempat tersendiri dan merupakan penelitian baru

²¹Dalam kajiannya, Amrullah lebih menitikberatkan pada pandangan tentang tradisi menulis menurut KH Hasyim Asy'ari dan dan kontribusinya bagi pengembangan pesantren dan kemudian mengomparasikannya dengan pendapat dan pandangan KH Bashori Alwi. Lihat Abdul Karim Amrullah, "Studi Komparasi Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Bashori Alei tentang Motif Menulis dan Kontribusinya bagi Pengembangan Pesantren", (Tersis, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004).

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Secara kategorikal, penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan gejala sosial²² berupa implikasi sikap *tawassuʿ* Aswaja NU. Dalam kategorisasi Noeng Muhadjir, penelitian ini adalah model studi pustaka atau teks yang seluruh substansinya memerlukan olahan filosofik atau teoritik yang terkait dengan nilai-nilai (*values*).²³

Sedangkan karena fokus penelitian ini adalah sikap *tawassuʻ*, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan oleh peneliti karena untuk menggali dan memahami makna yang terkandung di dalam data yang tampak.²⁴ Seperti yang diungkapkan Moeloeng, bahwa di antara signifikansi

²³Noeng mengklasifikasikan studi pustaka atau studi teks ke dalam empat kategori; *pertama*, studi pustaka sebagai telaah teoritik suatu disiplin ilmu yang perlu dilanjutkan dengan uji empiric untuk memperoleh bukti kebenaran empiric; *kedua*, studi teks yang mempelajari teori linguistic atau studi kebahasaan atau studi perkembangan bahasa; *ketiga*, studi pustaka yang seuruh substansinya memerlukan olahan filosofik atau teoritik dan terkait pada *values*; dan *keempat*, studi karya sastra. Lebih lanjut lihat Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), 296-297.

²⁴Hal ini sesuai yang dinyatakan oleh Sugiyono, bahwa metode kualitatif dapat digunakan apabila masalah penelitian belum jelas, untuk memahami mana dibalik data yang tampak, untuk memahami interaksi sosial, untuk memahami perasaan orang, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan

Berdasarkan bidang keilmuan, jenis penelitian ini adalah penelitian keagamaan (*religious research*), karena lebih menekankan kepada agama sebagai sistem dan sistem keagamaan.²⁶ Sasaran penelitian keagamaan menurut John Middleton adalah sebagai gejala sosial. Sehingga dalam penelitian ini metodologinya bisa meminjam metodologi penelitian sosial yang ada.²⁷

Karena penelitian ini library risert (studi pustaka), maka data yang didapat berasal buku, internet, dokumen terkait dengan penelitian yang memberikan informasi, data, tentang implikasi konsep *tawassuʿ Aswaja NU* itu sendiri. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini digali dari sejumlah literatur buku, jurnal ilmiah, arsip-arsip tentang kebijakan NU dan hasil penelitian sebelumnya.

Adapun data yang berkenaan dengan latar belakang berdirinya Aswaja NU, seperti kondisi sosial, politik, dan historis keagamaan saat itu diperlukan data-data dari literatur buku-buku, penelitian-penelitian terdahulu, maupun arsip-arsip yang bisa digunakan untuk mendukung penelitian ini. Sedangkan untuk implikasi konsep

²⁷ *Ibid.*, 11

Dalam melakukan inventarisasi data penelitian, penulis menggunakan dua metode; Pertama, metode dokumentasi²⁸, metode ini digunakan untuk menggali data-data yang berkenaan dengan pengertian *tawassuf*, pengertian dan sejarah *Ahl al-Sunah wa al-Jamā'ah*, pengertian dan sejarah NU, telaah biografis KH Hasyim Asy'ari, biografis Imam Abu Hasan al-Asyari serta kondisi sosial, politik serta keagamaan masa Imam Abu Hasan al-Asyari serta saat berdirinya NU ; Kedua, metode *analisis data*, yaitu dengan melihat implikasi penerapan konsep *Tawassuf Aswaja* NU yang telah dilakukan oleh organisasi ini.

Sebagaimana penulis jelaskan di atas, bahwa metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah dokumentasi maka data yang telah terinventarisir kemudian disajikan secara deskriptif-analitis, dengan uraian-uraian yang dapat memberikan gambaran dan penjelasan objektif kritis terhadap permasalahan yang diteliti.²⁹ Setelah itu, data penelitian dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan *content analysis*³⁰.

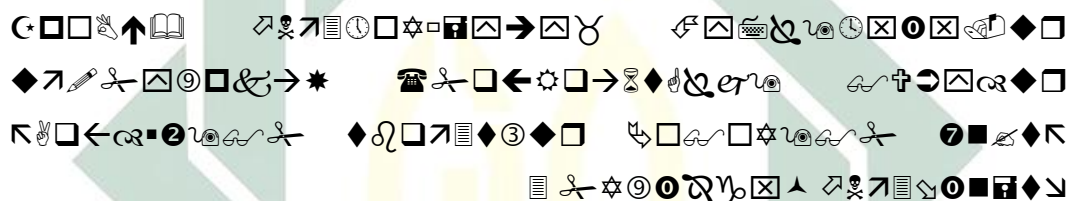
³⁰Weber mendefinisikan *content analysis* sebagai suatu metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah dokumen. Lihat Moloeng, *Metodologi Penelitian*, 163. Sementara Soejono dan Abdul Rahman mendefinisikanya dengan sebuah usaha mengungkapkan isi dari sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakat pada waktu buku itu ditulis. lihat Soejono dan Abdul Rahman, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 14. Dalam penelitian ini penulis lebih cenderung kepada pendapat Weber dalam melakukan analisis data menggunakan pendekatan *content analysis*.

5. Sistematika Bahasan

BAB II TAWĀSUṬ DAN HOLISME NILAI NAHDLATUL ULAMA (NU)

A. Pemaknaan *Tawāsuṭ*

Tawassuṭ yaitu: (sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan³¹) atau jalan pertengahan, tidak *taṭarruf* (ekstrem) ke kanan-kananan atau kekeri-kirian.³² *Tawassuṭ* disarikan dari firman Allah dalam (QS. Al Baqarah :143) yang artinya:



Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat pertengahan (yang adil dan pilihan) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muḥammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu sekalian..... (QS. Al Baqarah :143)

Tawassuṭ biasanya bersanding dengan istilah *i'tidal* (prinsip keadilan). Jika digabungkan menjadi *tawassuṭ* dan *i'tidal* yaitu sikap moderat yang berpijak pada prinsip keadilan serta berusaha menghindari segala bentuk pendekatan dengan *taṭarruf* (ekstrem).³³

Sikap *tawassuṭ* dan *i'tidal* yang termaktup dalam Kittah NU Keputusan Mukhtar XXVII 1984 mempunyai pengertian; sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di

³¹ Muhyidin Abdussomad, *Hujjah NU: Aqidah, Amalia, Tradisi* (Surabaya, Kalista, 2007), 7

³² Achmad Siddiq, *Khitthah Nahdliyyah* (Surabaya, Kalista, 2006), 38

³³ Soeleiman Fadeli dan Muhammad Subhan, *Antologi NU Buku I, Sejarah, Istilah, Amaliyah, Uswah*, (Surabaya, Kalista, 2012), 13

³⁵ Achmad Muhibbin Zuhri, *Pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari tentang Ahl-Sunnah wa al-Jamā'ah* (Surabaya: Khalista, 2010), 62.

Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah menggunakan paradigma *Tawassuṭ* (menengahi), yaitu suatu pola mengambil jalan tengah bagi dua kutub pemikiran yang ekstrim (*taṭarruf*) : misalnya antara *Qadariyyah (free-wilisme)* di satu sisi dengan *Jabbāriyah (fatalism)* di sisi lain; *skriptualisme ortodoks salāf* dan *rasionalisme Mu'tazilah* , dan ; antara *Sufisme Salafī* dan *Sufisme Falsafī*. Pengambilan jalan tengah bagi kedua ekstremitas itu juga disertai dengan sikap *al-Iqtiṣād* (moderat) yang tetap memberikan ruang dialog bagi pemikiran yang berbeda.³⁸

Manifestasi prinsip dan karakter *tawassuť* tampak pada segala bidang ajaran agama Islam yang yang harus dipertahankan, dipelihara dan dikembangkan sebaik-baiknya, terutama oleh pengikut setia Aswaja.

³⁹ Siddiq, *Khitthah*, 38

1. Bidang Aqidah

- Dalam persoalan shari'ah (fiqh) adalah sikap pertengahan antara *ijtihad* sembrono dan *taqlid* buta, dengan menggunakan cara bermazhab.⁴²

⁴⁰ Abdul Muchid Muzadi, *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajarannya* (Surabaya, Kalista, 2007), 71, (selanjutnya disebut: Muzadi, *NU*.....,)

⁴² Ibid, 149

- ⁴³ Ibid 72

[illegible]

- c. Kalau terjadi kesalahan dari pihak pemerintah, memperingatkannya adalah melalui tata cara yang sebaik-baiknya.

6. Bidang kebudayaan

- a. Kebudayaan, termasuk di dalamnya adat istiadat, tata pakaian, kesenian dan sebagainya adalah hasil budi daya manusia yang harus ditempatkan pada kedudukan yang wajar bagi pemeluk agama kebudayaan harus dinilai dan diukur dengan norma-norma hukum dan ajaran agama
- b. Kebudayaan yang baik, dalam arti menurut agama, darimanapun datangnya dapat diterima dan dikembangkan dengan prinsip *al-muḥāfadu ‘alā qodīmi ṣāliḥ wal akhdhu bi al-jadīdi al-aṣlah* (hal yang lama yang baik dipelihara dan dikembangkan, sedangkan yang baru dan lebih baik untuk dicari dan dimanfaatkan)
- c. Tidak boleh ada sikap apriori, selalu menerima yang lama dan menolak yang baru atau sebaliknya selalu menerima yang baru dan menolak yang lama.⁴⁵

7. Bidang dakwah

- a. Berdakwah adalah mengajak manusia untuk berbuat menciptakan keadaan yang lebih baik terutama menurut ukuran ajaran agama. Tidak mungkin orang berhasil mengajak seseorang dengan cara yang tidak mengenakan hati yang diajak. Berdakwah bukanlah menghukum.
- b. Berdakwah harus dilakukan dengan sasaran tujuan yang jelas, tidak hanya sekedar mengajak berbuat baik saja, menurut selera.
- c. Berdakwah harus dilaksanakan dengan keterangan yang jelas, dengan petunjuk-petunjuk yang baik, sebagaimana seorang dokter atau perawat berbuat terhadap

⁴⁵ Ibid, 73

⁴⁶ Siddiq, *Khitthah*, 63-68

⁴⁷ Muzadi, *NU*, 70

⁴⁸ Fealy, *Ijtihad*, 79. Lihat Siddiq, *Khittah*, 48

⁴⁹ Siddiq, *Pedoman*, 18.

⁵⁰ Siddiq, *Pedoman*, 17

⁵¹ Fealy, *Ijtihad*, 79

Sunan Kalijaga adalah salah seorang diantara walisanga yang sangat populer dalam budaya NU. Diantara semua wali, Sunan Kalijaga dianggap yang paling kreatif dan eklektik. Menurut legenda, Sunan Kalijaga mempunyai minat yang mendalam, sangat menghormati budaya Jawa, dan suka mengambil dan mengubah bentuk-bentuk budaya setempat untuk digunakan sebagai sarana pengembangan Islam. Ia terutama terkenal sebagai penggubah wayang kulit yang mengganti cerita pewayangan Hindu dengan cerita dan tema yang bernuansa Islam. Meskipun ia mendapat tantangan dari beberapa wali lainnya karena penyerapan budaya non-Islam.⁵⁴ Bagi kebanyakan orang NU Sunan Kalijaga

⁵⁴ Menurut beberapa sumber, Sunan Ampel dan Sunan Giri menggunakan pendekatan yang kurang akomodatif dalam berdakwah. Salam Solichin, *Sekitar Walisanga*, (Kudus: Menara Kudus, 1964), 28-30

Paradigma yang dikembangkan melalui legenda-legenda Walisanga ini menjadi ciri utama dalam persepsi diri NU. Sejak awal berdiri, organisasi ini sudah membedakan diri dengan yang mereka pandang sebagai modernisme Islam yang kering dan puritan yang diterapkan oleh organisasi-organisasi, seperti Muhammadiyah dan Persis. NU mewakili Islam pribumi. Ini tidak dilihat sebagai keyakinan cangkakan, tetapi lebih sebagai Islam yang diperkaya dengan unsur-unsur budaya setempat yang tidak bertentangan dengan shari'at.⁵⁶

Kebalikan dari *tawassuṭ wal i'tidal* ialah *taṭarruf*, ekstrim, berlebihan. Dari segi pengeralahan energi, *taṭarruf* kiranya jauh lebih banyak memerlukan energi dibanding *tawassuṭ* ; seperti halnya meninggalkan maksiat tentu lebih tidak ribet mengerahkan energi daripada melakukan maksiat. Hidup sederhana alias *tawassuṭ* jauh lebih sederhana katimbang hidup mewah, berlebihan.⁵⁷

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, Nahdlatul Ulama (NU) hadir mengataskanamakan ajarannya sebagai bagian dari kelompok (*firqah*) *Ahl al-*

⁵⁷ <http://gusmus.net/page.php?mod=dinamis&sub=10&id=69/> Tawassuth dan Tatharruf /A. Mustofa Bisri

1. Polarisasi Sejarah, Ajaran, dan Nilai-Nilai Ke-Aswaja-an

Kata *al-Jamā'ah* ini diambil dari sabda Rasulullah SAW:

ووالحافظ الذهبی

⁶⁰ Ibid, 7.

Tentang *al-Sunnah* dan *al-Jamā'ah* Shaikh Abdul Qadir al-Jilani (71-

561 H/ 077-1166 M) menjelaskan :

فَالسُّنَّةُ مَا سَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَالْحَجَّ مَا عَمَّ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ
رَسُولِ اللَّهِ فِي خِلَافَةِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ رَحْمَةُ
اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ
(الغنية لطالبي طريق الحق ، /)

Al-Sunnah adalah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. (meliputi usapan, perilaku, serta ketetapan beliau). Sedangkan *al-Jamā'ah* adalah segala sesuatu yang menjadi kesepakatan para sahabat Nabi SAW. pada masa Khulafaur Rashidin yang empat, yang telah diberi hidayah (mudah-mudahan Allah member rahmat kepada mereka semua)⁶¹

Lebih jelas lagi Shaikh K.H. Hasyim Asy'ari (1287-1336H/1871-1947

M) menyebutkan dalam kitab *Ziyadat Ta'liqat* (hal 23—24) sebagai berikut:

أَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ فَهُمْ أَهْلُ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْفَقْهِ فَإِنَّهُمْ الْمُهْتَدُونَ
الْمُتَمَسِّكُونَ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ وَالْخُلَفَاءِ بَعْدَهُ الرَّا سِدِينَ وَهُمْ الطَّائِفَةُ النَّاجِيَةُ
قَالُوا وَقَدْ اجْتَمَعَتْ الْيَوْمَ فِي مَذَاهِبِ أَرْبَعَةِ الْحَنْفِيَّوْنَ وَالشَّافِعِيَّوْنَ
وَالْمَالِكِيَّوْنَ وَالْحَنْبَلِيَّوْنَ

Adapun *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis dan ahli fiqih. Merekalah yang mengikuti dan berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW dan Khulafaur Rashidin sesudahnya. Mereka adalah kelompok yang selamat (*al-firqah al-najah*). Mereka mengatakan bahwa kelompok tersebut sekarang ini terhimpun dalam mazhab empat, yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali.

Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah adalah golongan pengikut setia pada *Ahl al-sunnah wa al-jamā'ah*, yaitu ajaran Islam yang diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat.⁶² *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* (Aswaja) adalah ajaran Islam yang murni sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah

⁶¹ Abdussomad, *Aqidah*,7-8.

⁶² Siddiq, *Khitthah*, 28

Dalam hubungan ini, Kubra Zadah menjelaskan:” ... aliran *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah* muncul atas keberanian dan usaha Abu Hasan al-Ash’ari sekitar tahun 300 H ...”⁶⁷. Karena ia lahir di tahun 269 H, dan menjadi pengikut Mu’tazilah selama 40 tahun.”⁶⁸ Dengan perkataan lain , al-Asy’ari keluar dari Mu’tazilah pada sekitar tahun 300 H, dan selanjutnya membentuk aliran tersendiri yang dikenal dengan namanya sendiri, yaitu mazhab Asy’ariyah. Sayyid Murtadha al-Zabidi juga mengatakan : ” Jika disebutkan *Ahl al-Sunnah*

⁶⁸ Harun Nasution, *Teologi Islam* (Jakarta UI Press, 2011), 65.

⁷² Zuhri, *Pemikiran*, 105

Pertentangannya dengan kelompok ‘Aishah menimbulkan perang *Jamal*, dimana akhirnya Ṭalhah dan Zubair gugur di sana. Sedangkan pertikaian dengan Mu’awiyah berpuncak pada perang *Siffin* yang berakhir dengan dilaksanakannya *tahkīm* (arbitrase). Sedangkan pendukung ‘Ali yang kecewa terhadap *tahkīm* akhirnya menjelma menjadi kelompok baru yang radikal dan dikenal dengan *Khawārij*. ‘Alī pun terbunuh akhirnya terbunuh dalam pemberontakan kelompok ini. Peristiwa itu dikenal dengan *al-Finah al-Kubrā* (musibah besar)⁷⁶

⁷⁶ Zuhri, *Pemikiran*, 41

Dalam kondisi demikian, muncullah *Murji'ah* yang menyatakan, pihak-pihak yang berseru itu semua tetap mukmin, namun diantara mereka siapa yang salah dan siapa yang benar diserahkan kepada Allah. Muncul selanjutnya *Jabbāriyah* yang mendoktrinkan sikap pasrah dan menerima semua yang terjadi sebagai ketentuan dari Allah. Sebagai reaksi *Jabbāriyah*, lahirlah *Qodariyah Ūlā* (Qodariyah generasi pertama). Menurut mereka, segala sesuatu yang terjadi adalah karena perbuatan manusia, Allah tidak lagi turut campur dalam hal itu. Manusia menanggung konsekwensi atas perbuatannya. Qodariyah inilah yang menjadi embrio lahirnya *Mu'tazilah*.

Pada kondisi seperti itu, sejumlah sahabat nabi mencoba menghindarkan diri kemudian melakukan gerakan-gerakan kultural serta menekuni bidang keilmuan dan keagamaan, yaitu, ‘Umar bin ‘Abbās, Ibn Mas’ud dan lain-lain. Kegiatan serupa juga dikembangkan oleh generasi tābi‘īn yang dipelopori oleh Ḥasan al-Baṣrī (w. 110/728 H) bersama para tābi‘īn lainnya. Arus baru inilah yang oleh para peneliti disebut *Proto-Sunnīisme* (embrio aliran *Sunnī*).⁷⁸

Lalu muncullah kelompok *muhaddithīn* (para ahli hadith), *fuqaha'* (para ahli fiqih) dan *mufasssirīn* (para ahli tafsir) termasuk di dalamnya ; Imam Abū Ḥanifah an-Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Muḥammad Idris al-Shafi'ī, dan Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Untuk memberi sanggahan

⁷⁸ Zuhri, *Pemikiran*, 44

Golongan *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* yang dipertegas oleh Aḥmad bin Ḥanbal memiliki kredibilitas sebagai *Ahl al-Hadith* lawan dari *Ahl al-Kalām*. Konsep *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* era ini adalah *taqḍīm al-Nāṣṣ ‘alā al-“Aql* (mendahulukan *Nāṣṣ* dari pada akal). Dengan demikian *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* sebelum abad ke-5 Hijriyah masih tertuju atau identik pada *Ahl al-Ḥadīth*. Abad ke-4 sampai abad ke-5 Hijriyah paradigm *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* identik dengan lawan *Shī'ah* ⁷⁹ dan beroposisi terhadap Bani ‘Abbāsiyah berpaham *Qadariyah-Mu'tazīlah* dan Bani Buwayh berpaham *Shī'ah*. Bahkan mereka mengadakan perlawanan bersenjata anti *Shī'ah*, *Mu'tazīlah* dan *Mutakallimūn*, termasuk al-Ash'ari dan *Ash'ariyyah*. Hal ini dikarenakan kehadiran al-Ash'ari diwarnai dengan upaya rasionalisasi terhadap teologi *Sunni* yang sebelumnya diwakili oleh *ahl al-Hadith*.

⁷⁹ Asep Saifuddin Chalim dalam bukunya *membumikan Aswaja*, memberi istilah pada kelompok ini dengan sebutan *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* dalam konteks umum, yaitu nama yang diberikan kepada semua kelompok yang bukan pengikut aliran Shi'ah, seperti Murji'ah, Mu'tazilah, karomiyah, Wahhabi dan lain-lain.

Hadirnya Abu Hasan Ali bin Isma'il (w.324H/935M) bisa dikatakan menyempurnakan teologi *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* karena relative dapat menuntaskan semua tantangan teologis yang berkembang saat itu. Corak moderat (*tawassuṭ*)-nya di dalam menyilapi persoalan-persoalan teologis yang kemudian dijadikan acuan pemikiran *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* berikutnya. Maka logis jika *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* sebagai idiom sosial keagamaan baru terkondisikan pada masa al-Ash'ari ini. Kemoderatan tampak dalam tulisan al-Ash'ari dalam bukunya *al-Ibānah an Usūl al-Diniyyah*

Pernyataan ini merupakan moderasi antara tekstualis *Ahl al-Hadith* dan pandangan rasionali *Mu'tazilah*.

⁸⁰ Zuhri, *Pemikiran*, 48

[illegible]

Selain deskripsi kesejarahan di atas, hal penting yang juga akan mempengaruhi bingkai pemikiran Nahdlatul Ulama', dari sisi *manhaj Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* adalah kesamaan doktrin dan konstruksi tindakan yang memiliki kesamaan. Tabel berikut ini adalah beberapa pokok ajaran *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* :

[digilib.uinsby.ac.id](#)

Tabel 2.1

Doktrin Sunni dalam bidang Keberagamaan dan Sosial-Politik

<i>Bidang Akidah.</i>	Fase awal, ketika <i>Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah</i> dipresentasikan oleh kelompok <i>ahl al-Hadith</i> atau <i>Salāfiyyun</i> , pemikiran-pemikiran di bidang akidah diperoleh berdasarkan elaborasi ayat-ayat al-Quran secara tekstual. Fase berikutnya, perkembangan <i>Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah</i> ditandai dengan integrasi filsafat dalam masalah ketuhanan. Periode ini dipelopori oleh Ibn Kullab (w. 240H/935M) yang kemudian diikuti oleh al-Ash'ari (w.324H /935M). Perbedaan dengan periode sebelumnya adalah dalam soal sifat dan nama Allah. Al-Asy'ari berpendapat nama bukanlah yang dinamai. Sifat bukanlah yang disifati. Sifat-sifat Allah adalah nama-nama-Nya, tetapi nama-nama bukanlah Allah dan bukan pula selain-Nya. (<i>lā hiya huwa wa lā hiya ghairuhu</i>). ⁸³
<i>Ajaran fiqh.</i>	Secara umum sumber hukum (<i>maṣādir al-ḥukm</i>) yang dijadikan dalam pijakan dalam <i>Sunnī</i> ada empat, yaitu al-Quran, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Perbedaan terjadi di dalam penekanan penggunaan sumber-sumber hukum itu oleh masing-masing mazhab dalam rangka <i>istimbat</i> hukum. Tentang eksistensi al-Quran baik fonetik (<i>lafḍiyah</i>) maupun semantic (<i>ma'nawiyah</i>) tidak diragukan lagi dikalangan <i>Sunnī</i> . Sedangkan al-Sunnah sebagai sumber hukum kedua yang bersifat <i>naqlī</i> , eksistensinya dipertimbangkan menurut tiga tingkatan kualitas kekuatan (<i>thubūt</i>)-nya. Penggunaan al-Sunnah digunakan setelah <i>istinbāt</i> (pengambilan) hukum dari sumber hukum al-Quran tidak memperoleh hasil, atau sebagai komplemen penjelas terhadap al-Quran. Penetapan derajat kekuatan al-Sunnah (<i>ṣahīh, ḥasan, ḍa'īf</i>) sangat berkaitan dengan kesepakatan (<i>Ijmā'</i>) para sahabat Nabi. Karena itulah, bagi kalangan <i>Sunnī</i> , <i>ijmā'</i> juga memiliki potensi yang kokoh sebagai sumber hukum. Sementara itu <i>Qiyas</i> sebagai sumber hukum Islam penggunaannya terutama adalah pengembangan <i>Qiyas</i> oleh <i>al-Shāfi'ī</i> . <i>Qiyas al-Shāfi'ī</i> ini menempati posisi yang dominan dalam berijtihad maupun dalam pengembangan ilmu pengetahuan. ⁸⁴
Ajaran sosial-politik	Dalam bidang sosial-politik kalangan <i>Sunnī</i> banyak mengambil referensi dari karya-karya al-Mawārdī, al-Baqillani, Abu Yā lā (w.526H/1131M) dan Ibn Taymiyah (w.728H/1327M). Berdirinya suatu negara merupakan suatu keharusan dalam suatu komunitas umat (Islam). Keberadaan negara tersebut dimaksudkan untuk mengayomi kehidupan umat, melayani mereka serta menjaga kemaslahatan bersama. Kebutuhan adanya negara juga didasarkan atas shari'at, yaitu kewajiban <i>ilāhiyyah</i> . Pendirian sebuah negara atau pemerintahan hukumnya adalah <i>farḍu kifāyah</i> . Doktrin <i>Sunnī</i> tidak membenarkan sebuah komunitas masyarakat vakum tanpa adanya pemerintahan, ⁸⁵ seperti yang diperbolehkan oleh kalangan <i>Khawarij</i> . Adapun bentuk negara, <i>Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah</i> tidak memiliki patokan yang baku. Yang lebih penting adalah substansi dari negara, apakah menampilkan spirit Islam atau tidak. Spirit Islam yang dimaksud, berupa prinsip umum yang harus dilaksanakan dalam sebuah negara, yaitu: 1) Prinsip <i>Shūrā</i> (Permusyawaratan), 2) Prinsip <i>al-'Adl</i> (Keadilan), 3) Prinsip <i>al-Hurriyyah</i> (Kemerdekaan, kebebasan), 4) Prinsip <i>al-Musawama</i> (kesamaan dalam hukum). Dalam prinsip ini semua warga negara mempunyai kewajiabn dan hak yang sama di depan hukum. Tidak dibenarkan adanya stratifikasi sosial (kasta, pengkelasan warga), deskriminasi dalam masyarakat,

⁸³ Ibid.,52⁸⁴ Ibid, 56⁸⁵ Zuhri, Pemikiran, 59

Tabel 2.2

Pola Perilaku Ahl al Sunnah wa Al Jamaah

Pola Perilaku	Keterangan
<i>Al-Tawassuṭ wa al-Iqtisād</i>	Kalangan <i>Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah</i> menggunakan paradigma <i>al-Tawassuṭ</i> (menengahi), yaitu suatu pola mengambil jalan tengah bagi dua kutub pemikiran yang ekstrem (<i>taṭarruf</i>) : misalnya antara <i>Qadariyyah</i> (<i>free-wilisme</i>) di satu sis dengan <i>Jabbāriyah</i> (<i>fatalism</i>) di sisi lain; <i>skriptualisme ortodoks salāf</i> dan <i>rasionalisme Mu'tazilah</i>, dan ; antara <i>Sufisme Salafi</i> dan <i>Sufisme falsafi</i>. Pengambilan jalan tengah bagi kedua ekstremitas itu juga disertai dengan sikap <i>al-Iqtisād</i> (moderat) yang tetap memberikan ruang dialog bagi pemikiran yang berbeda.⁸⁷ Pemikiran yang dinisbatkan kepada al-Asy'ari, dalam hal ini secara <i>par-excellence</i> mewakili kecenderungan moderasi <i>Sunnī</i>, karena keberhasilannya mengambil jalan tengah antara ekstrimitas <i>Ahl al-Hadith</i> dan <i>Mu'tazilah</i>. Meskipun demikian pemikiran Ḥanbali yang dikenal merepresentasikan <i>Ahl al-Hadith</i> tetap dapat mewakili moderasi <i>Sunnī</i>. Hal ini disebabkan pemikiran yang dikembangkannya juga berusaha menyelesaikan dua ekstremitas pada zamannya, yakni antara <i>Mu'tazilah</i> dan <i>Mujassimah</i>. Al-Ash'ari mengalami ketidakpuasan atas pola pikir <i>Mu'tazilah</i> karena ideologi ini terlalu berlebihan mengagungkan akal dan cenderung meninggalkan Hadith. Ia juga tidak sependapat dengan <i>Ahl al-Hadith</i> yang hanya mengambil <i>i'tibar</i> dari <i>ẓāhir naṣṣ</i>. Dalam persoalan sifat Tuhan misalnya, pemikiran <i>Sunnī</i> mencerminkan pengambilan jalan tengah terhadap ekstrimitas <i>Mu'tazilah</i> dan kaum tekstualitas-<i>Mujassimah</i> (<i>anthropomorphism</i>). <i>Mu'tazilah</i> menafikan sifat-sifat actual Tuhan (<i>nafy al-Sifāh</i>) sementara di pihak <i>Mujassimah</i>, juga terjadi personifikasi Tuhan dengan ciptaan-Nya. Mengenai perbuatan manusia, <i>Sunnīsm</i>e tampak jelas menunjukkan moderasinya. Al Asy'ari dalam hal ini, menolak pemikiran yang manafikan campur tangan Tuhan dalam perbuatan manusia, tetapi ia juga menolak pandangan bahwa Tuhanlah yang menentukan keseluruhan perbuatan manusia. Al-Ash'ari mengajukan konsep “Kasb”nya (perolehan). Manusia memperoleh kekuatan dari Tuhan untuk mengupayakan sendiri pekerjaannya.⁸⁸ Al-Ghazālī mempertegas pemikiran al-Ash'ari yang bercorak moderasi <i>Sunnī</i> dalam karya “<i>al-Iqtisād fi al-Itiqād</i>” (moderasi dalam akidah). Sikap moderat dalam tasawuf <i>Sunnī</i>, dengan adanya tiga jenis tasawuf:

⁸⁷ Ibid, 62⁸⁸ Ibid, 63

Nahdlatul Ulama menegaskan dirinya sebagai organisasi keagamaan (*Jam'iyah Diniyyah*). Lebih dari pada itu, menegaskan dirinya sebagai organisasi keagamaan Islam (*Jam'iyah Diniyyah Islamiyyah*). Adapun Ciri Diniyyah Nahdlatul Ulama itu tercermin pada beberapa hal: 1) Didirikan karena motif keagamaan, tidak karena dorongan politik, ekonomi atau lainnya, 2) Berasaskan keagamaan sehingga sehingga segala sikap tingkah laku dan karakteristik perjuangannya selalu disesuaikan dan diukur dengan norma hukum dan ajaran agama, 3) bercita-cita keagamaan, yaitu *Izzul Islam wal Muslimin* (kejayaan Islam dan kaum Muslimin) menuju *Rahmatan lil 'Alamin* (menyebarkan rahmad bagi seluruh alam), 4) menitikberatkan pada bidang yang langsung berhubungan dengan keagamaan, seperti masalah *'ubudiyyah, dakwah, ma'arif, muamalah* dan sebagainya. Kegiatan di bidang lain dibatasi sekedar mendukung dan memenuhi persyaratan perjuangan keagamaan.⁹⁹

98 Suaidi Asyari, *Nalar Politik NU dan Muhammadiyah* (Yogyakarta, LKiS, 2010), 98.
99 Siddiq, *Khittah*, 15
100 Ibid. 12

Berakar dari penamaannya, Abdul Muchit Muzadi menyebutkan keterlibatan para ulama dalam pendirian –sekaligus sebagai pendirinya- tidak

¹⁰⁰ Ibid, 12

Keberadaan Nahdlatul Ulama sebagai gerakan sayap tradisional. *Nahdlatul Ulama* bukanlah sesuatu yang sifatnya kebetulan. Sebaliknya disana terkandung suatu konotasi sebuah organisasi perjuangan berupa kebangkitan para ulama yang dinamis dan berkesadaran tinggi, serta melibatkan warganya untuk menjadikan organisasi ini sebagai alat perjuangan.¹⁰³

¹⁰¹ Wasid, *Gus Dur Sang Guru Bangsa: Pergolakan Islam, Kemanusiaan dan Kebangsaan*, (Yogyakarta, Interpena, 2010), 74. (selanjutnya disebut: Wasid, *Gus Dur*,)

¹⁰² Munawir, *Tradisi.....*, 2

¹⁰³ Gugun El-Guyani, *Resolusi Jihad paling Syar'i*, (Yogyakarta, Pustaka Pesantren 2010), 30. (selanjutnya disebut: El-Guyani, *Resolusi*,)

¹⁰³ Gugun El-Guyani, *Resolusi Jihad paling Syar'i*, (Yogyakarta, Pustaka Pesantren 2010), 30. (selanjutnya disebut: El-Guyani, *Resolusi*)

Seluruh Negara Islam akan diundang untuk menghadiri muktamar tersebut termasuk Indonesia. Awalnya utusan yang direkomendasikan adalah HOS Cokroaminoto (SI), K.H. Mas Mansur (Muhammadiyah) dan K.H. Abdul Wahab Hasbullah (Pesantren).¹¹⁸ K.H. Abdul Wahab Hasbullah yang mewakili pesantren atau Islam tradisional saat itu secara sepihak namanya dicoret dari daftar peserta, karena ditolak oleh beberapa kelompok Islam lainnya dengan

118 Ibid., 2

Penolakan yang dilatar belakangi dengan belum adanya organisasi ulama ini telah mengobarkan semangat para ulama pesantren untuk menunjukkan kemandirian dan kekuatannya.¹²⁰ Peristiwa ini menyadarkan para ulama pengasuh pesantren akan pentingnya sebuah organisasi. Bagi para kiai pesantren, pembaharuan adalah suatu keharusan. K. H. Hasyim Asy'ari juga tidak mempersoalkan dan bisa menerima gagasan kaum modernis untuk menghimbau umat Islam kembali pada ajaran Islam murni. Namun Kiai Hasyim Asy'ari tidak bisa menerima pemikiran mereka yang meminta umat Islam melepas diri dari bermazhab.¹²¹

119 Muzadi, NU, 161.
 120 Ibid, 34
 121 Soelaiman , *Antologi Buku I*,2
 122 Muzadi, NU, 34

C. Profil Singkat Abu Musa al Asy'ari dan KH. Hasyim Asy'ari

1. Biografi Abu Hasan al-Asy'ari (260-330H/873-947M)

¹²⁸ El-Guyani, *Resolusi*29

129 Ramli, *Pengantar*..... 88

¹³⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam* (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2011), 189. (selanjutnya disebut: Zahrah, *Aliran*)

101(selanjutnya disebut: Nurdin, *Sejarah*)

132 Ramli, *Pengantar* 85

133 Nurdin, *Sejarah*, 101

¹³⁴ Asy-Syahrastani, *Al-Milal wa al-Nihal*, (Surabaya, Bina Ilmu, 2006), 77 (selanjutnya disebut: Syahrastani, *Milal*)

Al-Asy'ari mengikuti aliran Mu'tazilah hingga usia 40 tahun.¹⁴⁰ Ada beberapa analisis mengapa al-Asy'ari lari dari aliran Mu'tazilah yang selama 40 tahun dibelanya. Alasan yang biasa digunakan adalah penjelasan yang berasal dari as-Subki bin 'Asakir,¹⁴¹ yakni pada suatu malam al-Asy'ari mimpi bertemu Nabi Muhammad dan mengatakan kepadanya bahwa mazhab ahli hadithlah yang benar dan mazhab Mu'tazilah salah. Dan sebab lain adalah bahwa al-Asy'ari berdebat dengan gurunya Ali al-Jubba'i dan dalam perdebatan itu gurunya tidak bisa menjawab tantangan muridnya itu. Namun alasan perdebatan ini ditolak oleh Ahmad Mahmud Subhi, sebab tidak ada sejarawan lain yang menunjukkan peristiwa ini terjadi.¹⁴²

¹⁴² Inti dari perdebatan tersebut adalah mengenai anak kecil yang mati sebelum ia dewasa. Ia menuntut kepada Tuhan agar ia diberi umur sampai dewasa, tetapi kenapa Tuhan mematikannya sebelum dewasa? Karena sekiranya ia diberi umur dewasa ia akan beriman dan masuk surga nanti. Tuhan akan menjawab bahwa kamu nanti akalu dewasa, kamu akan menjadi kafir. Oleh karena itu, demi menjaga

Ajaran al-Asy'ari dapat berkembang dengan pesat disamping faktor ajarannya yang mudah dipahami, sesuai dengan pola hidup masyarakat tradisional dan secara kuat berpegang kepada zahir ayat al-Quran dan hadis, juga didukung oleh khalifah-khalifah dan yang tak kalah penting adalah banyaknya tokoh al-Asy'ariyyah tersebut pada setiap generasi yang gigih berjuang membela dan mengembangkan ajaran-ajaran al-Asy'ariyyah.¹⁴⁸

Sebagai suatu analisa terhadap suatu aliran, faham maupun pemikiran, maka memahami kondisi atau latar belakang sosial, pemikiran pada masa

148 Nurdin, *Sejarah.....*,127

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada saat itu ditandai dengan tampilnya para ulama terkemuka dalam berbagai studi keislaman. Dalam bidang hadis menampilkan ulama-ulama besar yang menjadi rujukan kaum muslimin seperti; Muḥammad bin Ismail al-Bukhari (194-256H/810-870M)-pengarang *Shoheh Bukhari*, Muslim bin Hajjaj al-

¹⁵² Muhammad Idrus Ramli, *Mazhab Al- Asy'ari, Benarkah Ahlussunnah wal-Jama'ah*, (Surabaya: Khalista, 2009). 2 (selanjutnya disebut : Ramli, *Al-Asy'ari*.....)

Dalam bidang fiqih, tampil pula para mujtahid terkemuka dan pakar-pakar fiqih besar yang mengawal mazhab-mazhab tertentu, seperti Dawud bin Afi al-Ashbihāni (201-270H/816-884 M)- pendiri mazhab Zhahiri dan anaknya yang bernama Muḥammad bin Dawud al-Ashbihāni (255-297H/869-910M) yang mengawal mazhab ayahnya, Muhammad al-Jarir al-Ṭabari (224-310H/839-923M)-pendiri Mazhab Jariri, Iman Ismail bin Hanbal (w. 282H/895M)- pengikut mazhab Imam Maliki, sementara pengikut Imam Shafi'i diantaranya Abu Ali al-Karabisi (w.248H/862M), (w.259H/873M), (w.306H/918M), (w.340H/951M) menyebarkan mazhab Shafi'i di Irak dan Mesir. Dari pengikut Imam Ḥanbali, Abdullah bin Aḥmad bin Ḥambal (213-290 H/ 828-903M).

Tampil pula masa itu tokoh-tokoh tasawuf semisal Abū al-Qasim al-Junaid bin Muḥammad al-Baghdādī (w.297H/910M)-peletak kaidah-kaidah tasawuf dan rujukan kaum *Sunnī* dalam bidang tasawuf, Muḥammad bin Ali al-Hikam al-Tirmidzi (w.320H/932M)-penulis kitab *Nawadir al-Ushūl*, *Khatm al-Auliya'* dan lain-lain.¹⁵⁴

Pada masa –masa supremasi keilmuan Islam ini, bukan berarti kaum Muslimin aman dari ancaman dan tantangan. Justru pada masa ini kaum

¹⁵⁴ Ramli, *Al-Asy'ari*,..... 4

tengah antara keduanya, adalah tampilnya dua ulama semasa dengan Asha'ari, tetapi tempat tinggal mereka sangat berjauhan dan belum saling mengenal, yaitu al-Imam Abu Manshur al-Māturīdī al-Hanafī (w.333H/ 944M) yang tinggal di Samarkand, Uzbekistan dan al-Imam Ja'far al-Ṭahawī al-Hanafī (239-321H/853-933M) yang tinggal di Mesir.

[illegible]

Kiai Hasyim wafat pada tanggal 7 Ramadhan 1336 H/ 21 Juli 1947, ketika benteng pertahanan Hizbullah–Sabilillah di Singosari Malang direbut tentara Belanda.¹⁷¹ Menurut berbagai sumber, Kiai Hasyim meninggal dunia akibat penyakit darah tinggi atau stroke.¹⁷²

Tidak ada peristiwa di dunia ini yang berdiri sendiri secara mutlak, tidak terkait dengan peristiwa lain, Demikian juga kelahiran Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 1926 di Surabaya. Banyak hal yang mendorong kelahirannya dan mempengaruhi jalan sejarah serta perjuangannya. Tentu banyak pula hal-hal yang dipengaruhi olehnya. Beberapa kondisi saat kelahiran Nahdlatul Ulama (NU) dalam catatan terbatas akan peneliti lampirkan dibawah ini.

Nahdlatul Ulama (NU) lahir di tengah dunia sedang bergolak, demikian pula Indonesia saat itu juga sedang bergolak, juga umat Islam yang sedang bergelora dalam semangat perjuangan. Bahkan di kota yang dinamis penuh pergolakan yaitu kota Surabaya.¹⁷³ Di kota ini juga menjadi tempat perdebatan dan pertikaian antara mereka yang terpengaruh oleh ide-ide *salafiyah* radikal yang diperkenalkan oleh kaum wahabi di Nejed, dan

¹⁷³ Muzadi, *NU*....., 156.

Selain itu, banyak organisasi dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah untuk mendidik rakyat dan sekaligus menyusun kekuatan menuju kemerdekaan, antara lain Sarekat Dagang Indonesia (SDI, 1905) yang kemudian berubah menjadi Sarekat Islam (SI, 1911) Partai Sarekat Islam (PSI) yang kemudian menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII, 1929), Budi Oetomo (BO, 1908) kemudian bergabung dengan persatuan Bangsa Indonesia Raya (Parindo), Muhammadiyah (1912)¹⁸⁰, *Indische Sosial Democratische Vereenigin* (ISDV, 1914) setelah kaum komunis dibawah pimpinan Lenin berhasil merebut kekuasaan di Rusia (1917) yang dalam sejarah kelak menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI)¹⁸¹

¹⁸¹ Muzadi, *NU*....., 163.

Pada saat semangat heroisme yang demikian bergelora inilah, Nahdlatul Ulama didirikan oleh para ulama pengasuh pesantren yang memiliki aliran *Ahl al-sunnah wa al-jamā'ah*. Bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M atau 16 Rajab 1344 H para kiai menggelorakan semangat patriotisme mendeklarasikan sebuah organisasi keagamaan. Lewat pendekatan pendidikan keagamaan yang dilakukan secara intensif diberbagai pesantren, para kiai memompa semangat para santrinya untuk sadar dengan kondisi yang telah terjadi. Di sebuah pesantren besar Jawa Timur yakni Pesantren Tebuireng Jombang para kiai dan santri sudah mentradisikan

¹⁸⁶ Muzadi, *NU*....., 163.

Kedua, Muslim Jawa yang dalam pemikiran dan tingkah laku mengikuti Muḥammad Abduh, Rasyid Ridha, Muḥammad Abdul Wahhab al-Najdi, Ibn Taimiyyah, Ibn al-Qoyyim al-Jawziyah dan Ibn “Abd al-Hadi. Dalam pandangan kiai Hasyim, Muslim Jawa penganut tokoh-tokoh purifikasi Islam di atas telah mengharamkan berbagai praktik keagamaan yang sebelumnya telah disepakati berstatus *mandub* (disunnahkan) dan menolak *taqlīd*. Kritik tajam kelompok ini terutama diarahkan terhadap tradisi-tradisi keagamaan masyarakat Muslim setempat yang dinilai tidak lagi murni berlandaskan tawhid, tapi sudah bercampur *takhayyul*, *bid’ah* dan *khurafat*.

¹⁹³ Konstruksi Kiai Hasyim seputar *ijtihad*, *mazhaban*, *taqlid*, *bid’ah* dan berbagai ritual keagamaan dapat dipandang sebagai respon terhadap isu-isu yang dikembangkan kelompok ini.¹⁹⁴

Ketiga, Muslim Jawa yang mengikuti mazhab *Syi'ah Rafidloh*, yakni golongan yang mencela sahabat Abu Bakar al-Shiddiq dan Sayyidina Umar

194 Zuhri, Pemikiran 151

individu lainnya. Sementara para penganut *ḥulūl* dan *ittiḥād* adalah mereka yang sebenarnya bodoh dan tidak mengerti hakekat tasawuf.¹⁹⁷

Karena itulah tidak mengherankan jika narasi besar *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* yang dibakukan oleh kiai Hasyim lebih terfokus pada pembelaan terhadap tradisi keagamaan yang telah sekian lama dikembangkan oleh para ulama. Pembelaan dimaksud terutama merupakan respon terhadap aliran pembaharuan Islam yang berkembang saat itu.

Momentum berdirinya *Jam'iyah Nahdlatul Ulama* tidak terlepas dari dinamika politik di dalam maupun di luar negeri. Dinamika politik dan keagamaan dalam negeri banyak diwarnai oleh kebijaksanaan pemerintah Hindia-Belanda yang mencekram negeri ini hingga tiga setengah abad lamanya. Sedangkan dinamika politik luar negerinya banyak dipengaruhi oleh fenomena dunia Islam yang sedang marak melakukan gerakan dengan dalih pemurnian dan pembaharuan Islam lalu berkembang kepada gerakan politik penyatuan dunia Islam.¹⁹⁸

NU didirikan setelah sejumlah organisasi keagamaan, paguyuban dan organisasi nasional tumbuh subur dengan motifnya masing-masing. Organisasi-organisasi ini berdiri saat Indonesia berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Gerakan-gerakan muslim berjuang melawan para kolonialis yang juga membawa agama Kristen.¹⁹⁹

¹⁹⁷ Ibid, 154

¹⁹⁸ Imron, *Syaikhona*, 106.

199 Asyari, *Nalar*, 97.

BAB III

KAJIAN PROGRAM DAN KEBIJAKAN NAHDLATUL ULAMA (NU)
DI INDONESIA

Nahdlatul Ulama adalah *Jam'iyah diniyyah islamiyah ijtimaiyyah* (organisasi sosial keagamaan Islam) untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat dan martabat manusia.²⁰¹ Untuk mencapai cita-cita tersebut bukanlah persoalan yang mudah.

Dengan mencanangkan diri sebagai organisasi yang mempunyai tujuan berlakunya ajaran Islam yang menganut faham *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta,²⁰² tentulah membutuhkan suatu kebijakan-kebijakan yang matang dan terarah guna tercapainya tujuan tersebut. Jumlah pengikut yang begitu besar bukanlah sekedar kebanggaan, namun juga sebagai tantangan yang harus jawab.

Berbagai kebijakan yang telah dilakukan NU baik melalui jalur politik praktis, transformasi sosial-ekonomi, pendidikan, kebudayaan, terutama keagamaan NU selalu menampilkan dua watak, yakni kebijaksanaan dan keluwesan. Kebijaksanaan, bagi NU, adalah tindakan yang kondusif untuk memperoleh manfaat atau menghindari kerugian. Kewajiban untuk mengurangi atau menghindari segala bentuk risiko atau akibat buruk juga merupakan salah

²⁰¹ Dikutip dari Anggaran Dasar NU tahun 2010 yang ditetapkan secara resmi berdasarkan muktamar yang ke-32 Nahdlatul Ulama di Makasar Bab IV tentang Tujuan dan Usaha Pasal 8 ayat (1)

²⁰² Ibidayat (2)

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama dalam bidang pendidikan dibentuklah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama disingkat ISNU adalah badan otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual, dan juga Persatuan Guru Nahdlatul Ulama disingkat PERGUNU untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai guru dan atau ustadz.

[illegible]

Nahdlatul Ulama disingkat IPPNU untuk pelajar dan santri perempuan Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 30 (tiga puluh) tahun.

Sekolah atau madrasah adalah salah satu pengejawantahan amal Nahdlatul Ulama bagi masyarakat dan sekaligus merupakan saluran pengembangan ajaran Islam *'ala mazhabi Ahlisunnah wal Jama'ah*. Yang menarik dari Ma'arif adalah karakter khusus yang dimilikinya yaitu karakter masyarakat. Diakui sebagai milik masyarakat dan selalu bersatu dengan masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.²⁰⁵

Dalam tradisi intelektual, terdapat kegiatan *Bahsul Masail* yang sudah berlangsung sejak didirikannya, bahkan jika dilihat dari tradisi pesantren, maka *Bahsul Masail* sudah ada sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama. Aktivitas ini merespon dan memberikan solusi atas problematika aktual yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. *Bahsul masāil* dikoordinasi oleh lembaga Shuriyah (legislatif). Forum ini bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam (*al-qanuniyyah*) baik yang berkaitan dengan *masail fiqiyah* (masalah fiqh) maupun masalah ketauhidan dan bahkan masalah tasawuf (tarekat). Biasanya diikuti oleh Shuriyah dan ulama-ulama NU yang berada diluar struktur organisasi termasuk pengasuh para pesantren. Masalah yang dibahas umumnya merupakan kejadian (*waqi'ah*) yang dialami oleh anggota masyarakat yang diajukan kepada Shuriyah oleh organisasi ataupun perorangan. Masalah-masalah itu setelah diinventarisasi oleh Shuriyah lalu diadakan skala prioritas pembahasannya dan kemudian

²⁰⁵ Siddiq, *Khittah*, 77

dilakukan ke tingkat organisasi yang lebih tinggi; dari Ranting ke Cabang, dari Cabang ke Wilayah, dari Wilayah ke Pengurus Besar dan dari PB ke Munas dan pada akhirnya ke Mukhtamar.²⁰⁶

Untuk mendukung program ini maka dibentuklah Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama disingkat LBMNU, bertugas membahas dan memecahkan masalah-masalah *maudlu'iyah* (tematik) dan *waqi'iyah* (aktual yang akan menjadi Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama)

Pertualangan pemikiran NU baik ke Timur Tengah maupun ke Barat, tidak menjadikan komunitas ini menjadi kearab-araban atau kebarat-baratan, tetapi semakin mengukuhkan keindonesiaan mereka dan kerakyatan mereka. Dengan demikian maka bisa dimengerti kalau NU menjadi organisasi yang sangat nasionalis. Paham kebangsaan ini bukan bertolak dari pengalaman Barat, tetapi lahir dari rasa kecintaan dan apresiasinya terhadap nilai-nilai budaya lokal, sehingga cara beragamanya, cara berpolitiknya penuh dengan warna lokal. Pertahanan pada orisinalitas dan lokalitas itu menjadikan NU sering dituduh konservatif bahkan tradisional, tetapi sejarah membuktikan ketika organisasi lain yang mengkalim diri modern, yang sama-sama lahir semasa zaman kebangkitan nasional di tahun 1920-an, hanya NU yang tetap berkembang dan semakin besar. Sementara organisasi seusia lainnya tidak

²⁰⁶ Lihat di pengantar LTN PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas, Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010* (Surabaya, Kalista 2011), vi

sedikit yang sudah hilang dari peredaran sejarah. Ini potensi besar yang diabaikan banyak orang.²⁰⁷

Kebudayaan, termasuk di dalamnya adat istiadat, tata pakaian, kesenian dan sebagainya adalah hasil budi daya manusia yang harus ditempatkan pada kedudukan yang wajar bagi pemeluk agama kebudayaan harus dinilai dan diukur dengan norma-norma hukum dan ajaran agama.²¹¹

Kebudayaan yang baik, dalam arti menurut agama, darimanapun datangnya dapat diterima dan dikembangkan dengan prinsip *al-muḥāfadu ‘alā qodimi ṣāliḥ wal akhdhu bi al-jadīdi al-aṣlah* (hal yang lama yang baik dipelihara dan dikembangkan, sedangkan yang baru dan lebih baik untuk dicari dan dimanfaatkan)²¹²

Kemoderatan Nahdlatul Ulama disini nampak sebelum berdiri sebagai organisasi resmi. Berdirinya Tashwir *al-afkar* menunjukkan bahwa ulama tradisional (ulama dengan latar belakang Pesantren) mempunyai

²¹² Ibid, 67

5. Pondok Pesantren (Lembaga transmisi ajaran dan ilmu keislaman)

Pada masa penjajahan, ketika masa berdirinya NU, timbullah sikap eskapisme dan pengunduran diri dari sebagian umat Islam dari daerah urban ke pedesaan. Islam yang tadinya urban lantas berubah menjadi *rural*.²¹³ Pesantren telah berkembang selama berabad-abad menjadi suatu “pusat belajar masyarakat” bagi rakyat secara luas. Pesantren sejak awal juga telah mengembangkan gaya kepemimpinannya sendiri, dengan ciri hubungan guru–murid yang ketat dan intens, berdasarkan pada doktrin emanasi (*al-fa'id*) sufi. Menurut doktrin ini keagungan Allah memancar dari wajah-Nya, sebagai Cahaya Sejati (*an-Nūr*) dan membekas pada tipe-tipe orang tertentu, seperti guru-guru tadi.

Sama seperti kebijakan di bidang pendidikan Ma'arif, proses pendidikan yang ada di pondok pesantren Nahdlatul Ulama' juga dikenal lembaga penghubung bernama *Rābiṭah Ma'had Islamiyah* (RMI). Melalui lembaga ini, Nahdlatul Ulama' bisa melakukan monitoring dan kontrol terhadap apa yang diajarkan di dalam pondok pesantren yang berada di bawah naungan itu. Selain itu, pondok pesantren Nahdlatul Ulama' memang

²¹³ Sufyan, *Sarung dan Demokrasi, dari NU untuk Peradaban Keindonesiaan;NU dan Islamisasi Kultural* (Surabaya, Kalista, 2008). 128

Dengan demikian, jelas, bahwa pondok pesantren Nahdlatul Ulama' lebih mementingkan pada aspek-aspek kesalehan pribadi dan sosial. Di dalam pondok pesantren NU, umumnya, para santri diharapkan bisa memaknai tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat. Bukan untuk dihilangkan, melainkan menjaga hal yang baik, dan memperbaiki tradisi yang sedikit menyimpang dari karakteristik keislaman.

Menurut pandangan Jumhuril Ulama, setiap orang yang tidak memiliki keahlian untuk sampai pada tingkat kemampuan sebagai mujtahid mutlak, sekalipun ia telah mampu menguasai beberapa cabang keilmuan yang dipersyaratkan di dalam melakukan ijihad, maka wajib baginya untuk mengikuti (*taklid*) pada satu **qaul** dari para Imam Mujtahid dan mengambil fatwa mereka agar ia dapat keluar dan terbebaskan dari ikatan beban (*Taklif*)

Maka bertanyalah kalian semua kepada ahli ilmu jika kalian semua tidak mengetahui
(Q.S. Al-Anbiya' : 7)

Dengan berdasar pada ayat ini, seseorang yang tidak mengetahui, diwajibkan oleh Allah Swt. untuk bertanya, dan bertanya itu merupakan perwujudan sikap taqlid seseorang kepada orang yang 'Alim. Firman Allah ini berlaku secara umum untuk semua golongan yang dikhitobi. Secara umum pula firman Allah ini, mewajibkan kita untuk bertanya dan mempertanyakan segala sesuatu yang tidak kita ketahui, sesuai dengan kesepakatan atau konsensus Jumhur al Ulama. Karena sesungguhnya orang yang beridentitas awam itu pasti ada sejak zaman generasi sahabat, tabiin dan hingga zaman setelahnya, mereka wajib meminta fatwa kepada para mujtahid dan mengikuti fatwa-fatwa mereka dalam hukum-hukum syari ah dan mengimplementasikannya sesuai dengan petunjuk Ulama.²¹⁵

Sistem bermazhab atau jaringan permazhaban yang menghimpun sekian banyak faktor, mulai dari pelaku (*Mujtahid*), faktor pembentuk (*Ijtihad*), faktor proses dan prosedur, faktor pola dan metode, faktor dalil rujukan, faktor pengikut dan lain-lain, adalah sistem pengendali terhadap

²¹⁴ Asy'ari, *Risalah*,....., 18

²¹⁵ Asy'ari, *Risalah*,....., 18

Namun realitas yang ada, kecenderungan dari empat mazhab yang disepakati NU, mazhab Shafi'i lebih mendominasi di kalangan Nahdiyyin. Menurut Abdul Mughis Muzadi, kecenderungan ke-fiqh mazhab Shafi'i sebenarnya tidak lepas dari sejarah masuknya Islam di Indonesia yang dibawa oleh para mubaligh yang sudah menganut mazhab Shafi'i. Kemudian ajaran itu masuk ke dalam masyarakat lokal yang sama sekali masih awam tentang Islam, sehingga tidak ada alternatif referensi lain kecuali hanya menerima ajaran tersebut apa adanya. Sementara karakter budaya masyarakat lokal adalah tradisional, yakni cenderung mempertahankan tradisi budaya yang sudah menjadi konvensi. Di samping itu lestarnya ajaran mazhab ini juga disokong oleh sistem nilai pesantren yang selalu mengindahkan semua bentuk kebijakan *sole solders*-nya, sebagai hasil seleksi kultur agama.²¹⁷

Di bidang ‘Aqidah, Nahdlatul Ulama mengikuti faham Ahlussunnah wal Jama’ah yang dipelopori oleh Imam Abu al-Hasan Al Asy’ary dan Imam Abu Mansur Al Matuddi. Asy’ariyah bersikap mengambil jalan tengah (tawasuth) antara pendapat Jabariyah dan Mu’tazilah. Mu’tazilah

²¹⁷ Abdul Mughis, *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008), 324.

Adapun pendapat al-Asy'ari tentang sifat-sifat Allah adalah jalan tengah antara golongan Mu'tazilah dan golongan Jahamiyah disatu pihak, dan golongan Hashwiyah dan golongan Majassimah di pihak lain. Golongan pertama (Mu'tazilah, Jahamiyah) menafikan sifat-sifat Allah yang diterangkan dalam al-Quran. Sedangkan golongan Hashwiyah dan Majassimah berpendapat bahwa sifat-sifat Dzāt Allah sama dengan sifat-sifat makhluk-Nya. Al-Asy'ari menetapkan sifat Allah adalah sifat-sifat yang layak bagi Dzāt-Nya, dan tidak menyerupai sifat-sifat makhluk-Nya yang nama sebutannya sama.

Tentang al-Quran , golongan Mu'tazilah berpendapat al-Qur'an itu makhluk, sesuatu yang baru, diciptakan oleh Allah. Golongan Hashwiyah berpendapat: adapun huruf-huruf yang terpotong-potong , barang-barang

[illegible]

Masalah dosa besar, golongan Mu'tazilah berpendapat: Sesungguhnya orang yang berdosa besar beriman dan taat apabila ia tidak bertaubat dari dosa besar itu, dia tidak bakal dikeluarkan dari neraka. Golongan Murji'ah berpendapat barang siapa yang ikhlas karena Allah SWT. dan beriman kepada-Nya, maka bagaimanapun tidak akan membahayakan imannya. Al-Asy'ari berpendapat bahwa orang yang berdosa besar adalah mukmin yang fasik, sebab iman tidak mungkin hilang karena dosa selain kufur, dan keputusan masuk surga atau neraka diserahkan kepada Allah.²²⁰

Di bidang Tasawwuf Nahdlatul Ulama mengikuti Imam Al Junaid Al Bagdadi dan Imam Al Ghazali serta Imam-Imam yang lain. Untuk menmengakomodir gerakan kemazhaban ini, dibentuklah Badan Otonom yaitu: *Jam'iyah Ahli Thariqoh Al-Mu'tabarah An-Nahdliyyah* untuk

²²⁰ Salihun A. Nasir, *Pemikiran Kalam Teologi Islam*, (Jakarta, Rajawali Press, 2010), 253 (selanjutnya disebut : Nasir, *Teologi Islam*.....)

Kiai Hasyim Asy'ari sendiri juga pelaku tasawuf yang mengikuti paham Sunnī *orthodox* (sesuai dengan prinsip-prinsip Islam) sebagaimana yang dirumuskan Al- Junaid al-Baghdādī dan al-Ghazali. Sufi jenis ini mengutamakan peningkatan nilai-nilai moral dan kesalehan dengan jalan melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawah Nabi Muhammad SAW.²²³

Meskipun NU didirikan bukan sebagai organisasi politik, tetapi peran politik NU adalah peran yang paling menonjol.²²⁴ Sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari seluruh bangsa

²²⁴ Salahuddin Wahid, *Menggagas NU Masa Depan* (Jombang, Pustaka Tebuireng, 2010), 2

Dua alternatif politik NU yang sebenarnya pernah membesarkan NU dalam kancah kebangsaan. Wilayah *pertama* dan tertinggi adalah politik kerakyatan. Politik model ini dilakukan NU pada awal berdirinya (1926) dengan menandakan diri sebagai *jam'iyah diniyyah* yang melindungi praktek Islam lokal dari “pemberangusan budaya” (*ikonoklasme*) yang dilakukan gerakan puritanisme Islam ala Wahabisme Timur Tengah. NU melindungi tradisi keagamaan orisonal masyarakat Indonesia dengan pendekatan pendidikan dan kebudayaan. *Kedua*, politik kenegaraan. Politik ini dijalankan NU melalui keterlibatan wakilnya semisal K.H Wahid Hasyim dalam perumusan UUD Negara 1945, dengan menyelamatkan Pancasila dari praktik eksklusifisme Islam. NU juga terbukti tidak terlibat berbagai pemberontakan bahkan ikut memberangus G30S PKI. Politik NU juga dijalankan dengan manis melalui gerakan oposisi kultural terhadap otoritarianisme Soeharto (1984-1998). NU dalam masa itu betul-betul menjadi primadona *civil society*.²²⁶ Wilayah *ketiga*, adalah politik kekuasaan. Jenis ini merupakan tingkatan politik terendah namun paling banyak disukai NU. Termasuk pasca-Khittah 1926 masih sering terjadi perang posisi (*war of position*) antara sayap politisi dengan sayap *civil society*.

Peran NU dalam perihal politik dalam versi peneliti tentang konsep tawassut dipaparkan sebagai berikut :

²²⁶ Syaiful Arif, *Nahdlatul Ulama, Dinamina Ideologi dan Politik Kenegaraan (Politik NU Pascapilpres)*, (Jakarta: Kompas, 2010), 19.

Di masa penjajahan Jepang dengan pembekuan semua organisasi rakyat, para tokoh ulama Nahdlatul Ulama memperlihatkan sikap kerja sama dengan Jepang dengan harapan dapat tetap berhubungan dengan rakyat dan mempersiapkan rakyat merebut kemerdekaan. Pada zaman revolusi fisik, Nahdlatul Ulama bahu membahu dengan seluruh lapisan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan yang terkenal dengan “Resolusi Jihad”-nya K.H Hasyim Asy’ari dan mengisi kemerdekaan serta menyalurkan aspirasi politik melalui partai Masyumi.

7. Memisahkan diri dari Masyumi dan menjadi Partai Politik

[illegible]

“kebangsaan”. Dimana konsep tersebut diartikan oleh Ahmad Baso dengan mengejawantahkan pilar kebangsaan memperlebar pemaknaan ke-NU-an sebagai bagian dari segenap komponen kebangsaan. Artinya dalam pandangan kebangsaan ini, ke-NU-an dan keislaman bukanlah tandingan atau alternative terhadap bangsa, tapi bagian dari komponennya yang saling menguatkan.²³⁴ Pada Harlah ke-66 NU menggerakkan sebuah oposisi cultural *vis avis* negara dengan menolak pencalonan kembali Suharto sebagai presiden.²³⁵

9. NU Pasca Reformasi

Di masa reformasi NU menunjukkan identitas sebagai kantong pemikiran Islam yang cukup berwibawa. Bukan hanya itu, pemikiran-pemikiran tersebut bermetamorfosis menjadi kekuatan transformatif. Pemikiran keagamaan progresif komit melakukan pemberdayaan dan kerja-kerja pembebasan. Menurut Zuhairi Misrawi, secara kultural, pemikiran progresif di lingkungan NU merupakan produk pergulatan NU dengan masyarakat sipil (*civil society*) akibat kembali ke khittah, terutama mendorong NU menjadi lokomotif *civil society* di Indonesia. Bukan hanya

²³⁴ Chafid Wahyudi, “NU dan Civil Relegion”, dalam *Antologi Kajian Islam*, ed. M Ridwan Nasir, et.al (Surabaya, Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, 2011), 2

²³⁵ Syaiful Arif, *Dari Kiai Kampung ke NU Miring*, (NU Pasca-Kebudayaan) (Yogyakarta, Arruz Media), 165. Dalam harlah tersebut, terjadi suatu *theatricum symbolicum*, yaitu 150.000 warga Nahdliyyin menggelar Rapat Akbar NU 1 Maret 1992 dengan agenda kesetiaan terhadap Pancasila. Rapat tersebut merupakan perlawanan simbolik yang digerakkan oleh Gus Dur untuk merebut penafsiran tunggal Pancasila dengan menyatakan bahwa pemerintah dan Suharto yang hendak mencalonkan kembali sebagai presiden itu telah melanggar nilai-nilai asasi Pancasila.

Dalam Mukhtamar tersebut, NU memberikan putusan wajib mempertahankan Indonesia dengan menempatkan sebagai *Dār al-Islām* (Negara Islam) dengan alasan mayoritas penduduknya agama Islam dan pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang-orang Islam. Wacana tentang relasi agama dan negara menjadi tuntas di tangan K.H.Ahmad Shiddiq. Baginya relasi antara agama dan negara diibaratkan “dua sisi mata uang yang berbeda, namun hakekatnya saling berhubungan dan saling membutuhkan”. Dasar Negara (Pancasila) dan agama Islam adalah dua hal yang sejalan dan saling menunjang. Keduanya tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. Keduanya tidak harus dipilih salah satu dengan sekaligus membuang yang lain”.²³⁹

NU dianggap oleh banyak kalangan sebagai penyanggah moderasi Islam di Indonesia. Identitas ini dapat ditemukan jawabannya manakala memperhatikan fenomena bagaimana NU sebagai organisasi Islam memelopori untuk menerima Pancasila sebagai asas tunggal di Indonesia, dan (namun) menolak penafsiran tunggal oleh pemerintah.²⁴⁰

²⁴⁰ Ibid, 2

Beberapa kebijakan Nahdlatul Ulama tingkat internasional bisa diperhatikan sebagai berikut :

Tahun 1925 sebagai delegasi kelompok *Sunnī* dunia yang menghadap Raja Hijaz (Arabia) agar tidak memaksakan penggunaan faham Wahabi dan tidak menghalangi jalan bagi mazhab-mazhab selain mazhab Wahabi. Bertindak sebagai pemrakarsa penyelenggaraan Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) tahun 1965 yang diikuti oleh 37 negara. Di tingkat Internasional Nahdlatul Ulama mendirikan organisasi yang beranggotakan para ulama dan cendekiawan dari seluruh dunia yaitu *International Conference of Islamic Scholars* yang disingkat ICIS. Ide dasar digagas oleh Ketua Umum PBNU DR. K.H A. Hasyim Muzadi.

[illegible]

BAB IV

4. Bidang Sosial

94

Dalam berdakwah, NU selalu menampilkan wajah Islam yang ramah; ramah terhadap budaya lokal, adat setempat, dan agama-agama yang ada. Berdakwah harus dilaksanakan dengan keterangan yang jelas, dengan petunjuk-petunjuk yang baik. Kalau terdapat kesulitan, maka kesulitan itu harus ditanggulangi dan diatasi dengan cara yang sebaik-baiknya. Sikap mengayomi yang diterapkan oleh para mubaligh kaum *Sunnī* yang dilakukan para ulama pesantren terhadap umat Islam di Indonesia terjalin begitu baik sehingga masyarakat menaruh hormat yang sangat terhadap para ulama khususnya di Jawa.

Karakter melayani umat yang pegang dan diamalkan oleh para ulama diaplikasikan dalam berbagai bentuk, diantaranya: 1) Para ulama Sunnī disamping keunggulan dalam ilmu agama, sebagian besar atau kalau tidak bisa dikatakan hampir semuanya, punya kemampuan spiritual dalam menyelesaikan berbagai persoalan umat baik yang bersifat pribadi, keluarga maupun masyarakat bahkan sampai pada tingkat negara, yang tidak dimiliki oleh sembarang orang. 2) Pelayanan ulama terhadap umat secara materi biasanya diberikan secara tidak langsung dengan biaya yang murah bahkan digratiskan bagi santri yang tidak mampu. Dari keikhlasan para ulama dalam memberikan pelayanan ini, wali santri yang tidak mampu tersebut biasanya memberikan sebagian hasil panen berupa beras, sayur mayur, palawija sebagai balas budi kepada para ulama penasuh pesantren tersebut. Metode

dakwah ini ternyata mampu menjalin hubungan yang begitu erat antara santri, kiai, dan wali santri di kalangan umat Islam khususnya di Jawa.

Pada program pendidikan yang dijalankan NU melalui *ma'arif* adalah salah satu bentuk pengejawhathan dari ajaran *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*. Istilah Surahno, panen “orang pandai” (*Booming Nahdiyyin*) tampak sedang dan akan terus dialami oleh NU. Ini bisa dibaca sebagai fenomena menarik ketika perkembangan dan dinamika generasi muda Nahdiyyin cepat dan pesat. Tidak bisa dipungkiri, geliat intelektual dan aktivitas sosial generasi muda Nahdiyyin dipengaruhi oleh semangat yang menurut Hairus Salim disebut sebagai *kultur hibrida* dengan model eklektisisme yang kental (menggabungkan tradisi atau budaya intelektual yang bersifat perpaduan berbagai komponen). Hal tersebut dikarenakan NU merupakan *jam'iyah* yang meletakkan dasar akidah *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* (Aswaja), mau tidak mau ini menjadi basis dan ruh semua pemikiran aktifitasnya. Kaidah melestarikan yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik (*al-muhāfadhah 'ala al-qadīm al-ṣāliḥ wa al-akhḍhu bi al-jadīdi al-aṣḥlah*) sudah akrab dikalangan generasi Nahdiyyin. Dalam derajat tertentu, semangat eklektisisme ini mendasari dan turut membentuk pola berfikir dan bersikap moderat dikalangan generasi muda Nahdiyyin.²⁴³

Mengenai program kegiatan *Bahsul Masāil* yang merupakan tradisi intelektual NU yang sudah mengakar dan menjadi tradisi dipesantren,

²⁴³ Surahno, *Dari Kiai Kampung ke NU Miring,(Booming Nahdliyyin)* (Yogyakarta, Arruz Media), 212.

5. Bidang Keagamaan

[illegible]

Perkembangan pesat generasi muda Nahdliyyin ini dibidang intelektual dan aktifitas sosial ini menurut Hairus Salim dkk (1998) ini didorong oleh beberapa hal diantaranya adalah kekayaan tradisi intelektual. Selain generasi muda Nahdliyyin fasih dan familiar dengan khasanah Islam klasik yang mereka peroleh di pondok pesantren dan atau madrasah, mereka juga mendalami ilmu-ilmu umum. Dua aspek yang dikolaborasi pesantren dalam penyiapan kader-kader Islami merupakan implikasi dari konsep tawassuť. Dampaknya terhadap santri sebagai subyek dalam pesantren adalah kemampuan yang didapat di pesantren menjadi bekal bagi masa depannya. Terhadap pesantren yang mampu melakukan konsep (tawassuť) tersebut akan meningkatkan kepercayaan umat terhadap pesantren tersebut. Semakin kuat kemandirian pesantren-pesantren yang ada, berarti akan berimplikasi secara langsung terhadap kelangsungan NU sebagai organisasi pengemban ajaran *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*.

[illegible]

Dipilihnya empat mazhab ini karena sudah terkodifikasi dengan metode yang jelas dan lahir dari sosio-kultural yang berbeda-beda, sehingga penerapan syariah ala NU mudah diterima di setiap situasi dan kondisi apapun, tanpa menimbulkan konflik.²⁴⁵ Mengapa NU memilih empat mazhab tersebut dalam melaksanakan ajaran fiqihnya? Ada beberapa alasan yang bisa dijelaskan sebagai berikut : 1) Secara kualitas pribadi dan keilmuan mereka sudah mashur, artinya jika disebut nama mereka hampir dapat dipastikan

[illegible]

²⁴⁶ Ahmad Syubbanuddin Alwy, *Dari Kiai Kampung ke NU Miring*, (Yogyakarta, Arruz Media), 128-129

fenomena mayoritas warga Nahdliyin yang telah mengasumsikan kecenderungan tafsir teologis ²⁴⁷

Kemudian, di dalam *Tasawuf Sunni* merupakan jalan tengah antara kelompok *batiniyah* dan *tasawuf Falsafi*, karena kelompok batiniyah memberi etensi yang berlebihan terhadap aspek batiniyah. Yang pertama memberikan etensi yang berlebihan terhadap aspek batiniyah, sehingga cenderung menegasikan tuntutan kemanusiaan yang berporos pada penalaran rasio. Sedang yang kedua tasawuf telah memasuki wilayah ontology (‘*ilm al-kawn*) yang jelas-jelas sangat dipengaruhi oleh wara filsafat yang mengaung- agungkan rasio. Sehingga pada tasawuf *Falsafi* ini yang dibicarakan masalah *emanasi (fayl)*, *inkarnasionism (hulūl)*, keesaan (*wihdah*) dan seterusnya.

Kedua ekstrimitas dalam tasawuf diatas, dipandang bisa menyebabkan *isthirāk* (penyekutuan Tuhan) karena memungkinkan terhubungnya manusia dengan Tuhan dalam satu kesatuan yang mereka sebut dengan istilah *Tajrīd al-Fanā' fī al- Tawhīd*.

6. Bidang Politik

Bercermin dari kondisi yang melatarbelakangi berdirinya NU, maka kepedualian NU terhadap keberadaan ajaran *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* sangat besar, baik dalam skala Nasional maupun skala Internasional. Dalam skala Nasional terbukti bagaimana pembelaannya terhadap keberlangsungan

²⁴⁷ Pemikiran tradisional percaya bahwa permasalahan kemiskinan umat pada hakekatnya adalah ketentuan Tuhan. Lihat Ahmad Syubbanuddin Alwy, *Dari Kiai Kampung ke NU Miring*, (Yogyakarta, Arruz Media), 128

Keputusan tahun 1954 tentang *Waliyul Amri Dharuri Bisysyaukah*; yaitu, keputusan tentang status Soekarno sebagai *pemegang sementara kekuasaan de facto*, merupakan suatu keberanian NU dalam mengambil sikap dengan mengutamakan kepentingan umat dan sikap konsistensi terhadap hukum. Bagaimana tidak, ketika musyawarah para rektor se-Indonesia yang telah memutuskan bahwa Presiden Sukarno adalah waliyul amri, tanpa ada tambahan dharuri.

Dengan kembalinya NU ke Khittah 1926 pada tahun 1980-an oleh Abdurrahman Wahid dipahami sebagai sebuah “pembaharuan” dan “kebangsaan”. Dimana konsep tersebut diartikan oleh Ahmad Baso dengan mengejawantahkan pilar kebangsaan memperlebar pemaknaan ke-NU-an sebagai bagian dari segenap komponen kebangsaan. Artinya dalam pandangan kebangsaan ini, ke-NU-an dan keislaman bukanlah tandingan atau alternatif terhadap bangsa, tapi bagian dari komponennya yang saling menguatkan.²⁴⁸

[illegible]

Perkembangan pesat generasi muda *Nahdliyyin* ini dibidang intelektual dan aktifitas sosial ini menurut Hairus Salim, ini didorong oleh beberapa hal Salah satunya adalah marginalisasi ekonomi-politik. Harus diakui dalam perjalanan sejarahnya, NU sering, untuk tidak mengatakan senantiasa, dimarginalkan oleh rezim yang berkuasa. Realitas historis seperti inilah yang barangkali menjadi cambuk generasi muda *Nahdliyyin* untuk bangkit dengan bekal pengetahuan dan pengalaman mereka.²⁵⁰

Sejak “NU kembali ke Khittah 1926” melalui Mukhtar Situbondo 1984 para kiai NU bebas berafiliasi dengan partai politik mana pun (termasuk Golkar) dan menikmati kedekatan dengan pemerintah. NU tidak lagi “dicurigai” oleh pemerintah sehingga segala aktivitasnya tak lagi dilarang

²⁵⁰ Surahno, *Dari Kiai Kampung ke NU Miring, (Booming Nahdliyyin)* (Yogyakarta, Arruz Media), 208-209

Kesiapan NU untuk berbagi, bergabung dan mendukung para politisi dan pimpinan selain NU menunjukkan sebuah kebesaran politik yang dibutuhkan bagi proses demokratisasi Indonesia yang “ideal” Adanya Sembilan pedoman politik NU yang dijadikan sebagai referensi bagi warga NU dalam berpolitik menunjukkan betapa keinginan NU dalam mendidik warga Nahdliyyin untuk menggunakan hak politiknya secara bertanggungjawab tanpa adanya tekanan dari NU sebagai organisasi yang meskipun di dalamnya sudah ada beberapa Partai Politik, PKB, PKNU, PNU, namun kemoderatan NU ditunjukkan dengan tidak adanya intervensi ke dalam warga Nahdliyyin untuk mendukung partai-partai yang berafiliasi ke NU. Ini adalah pembelajaran pendewasaan system demokrasi yang paling terbuka di Indonesia jika dibandingkan dengan organisasi-organisasi yang ada di Indonesia yang melakukan doktrin-doktrin khusus terhadap anggota kelompoknya.

Dalam sejarah perjalanan bangsa ini NU selalu memperjuangkan politik kebangsaan. Artinya NU memperlakukan soal kebangsaan dalam suatu kesatuan dengan Islam yang substansial. NU tidak pernah menggagas

²⁵² Ibid., 205.

Keputusan menjadikan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI sebagai sesuatu yang final dan berkeputusan tetap dalam Muktamar NU ke-22 tahun 1984, yang merupakan gerakan menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya

²⁵⁴ Ahwan Fanani, *Sarung dan Demokrasi, dari NU untuk Peradaban Keindonesiaan; NU dan Islamisasi Kultural* (Surabaya, Kalista, 2008), 224

Implikasi tawassuṭ dalam kegiatan *bahsul masail*, bisa kita perhatikan dari keberadaan kegiatan ini antara problematika yang muncul dimasyarakat dengan kepastian hukum yang ada baik dari hukum agama di satu sisi maupun hukum negara disisi lain, belum bisa memberikan alternatif jawaban secara terperinci. *Bahsul masail* merupakan jalan tengah antara problematika atau persoalan yang muncul di tengah umat di satu sisi, dengan kebutuhan akan kepastian hukum baik dari hukum agama maupun hukum Negara (hukum positif). Untuk mencapai kepastian hukum agama, maka dibutuhkan

[illegible]

[digilib.uinsby.ac.id](#)

Sebaliknya NU akan tegas dengan kelompok yang jelas-jelas memusuhi umat Islam dan mengancam kelangsungan hidup bersama. Bagaimana peran NU dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia dari penjajahan Belanda dan Inggris dengan “Resolusi Jihad”nya K.H Hasyim Asy’ari dan juga bagaimana ketika peran NU dalam menumpas G 30 S PKI tahun 1965 dikarenakan Partai Komunis Indonesia merupakan ancaman bagi kelangsungan umat beragama pada umumnya dan khususnya Islam serta Negara Indonesia yang akan diubah ke ideologi komunis. Maka berlaku tegas terhadap PKI saat itu adalah bentuk dari implikasi konsep tawassutnya NU.

Kalau umumnya ormas Islam memiliki satu mazhab. Sementara NU merupakan satu satunya organisasi yang menyatakan memegang salah satu dari mazhab empat. Padahal masing-masing mazhab itu saling berbeda, apalagi di tangan pengikutnya perbedaan itu sedemikian tajam. Tetapi semuanya diakomodir oleh NU

Teologi yang bermazhab pada Imam Abu Ḥasan al-ʿAsyʿari adalah teologi jalan tengah (tawassuṭ) dari berbagai pemikiran yang ada. Nilai tawassuṭ yang diterapkan oleh Aswaja, yang dalam ranah Islam di Indonesia diadopsi oleh NU merupakan konsep yang paling mudah dalam menjalankan nilai-nilai agama, sehingga implikasinya adalah Aswaja lebih mudah diterima oleh seluruh lapisan. Pemikiran teologi yang dikembangkan oleh al-ʿAsyʿari tidak menuntut adanya kemampuan khusus sebagaimana yang dikembangkan oleh pemikiran Muʿtazilah. Dasar yang digunakan dengan lebih mengutamakan wahyu al-Qurʾan pada rasio atau akal, akan lebih terjaga dan merasa lebih aman dari pada mengandalkan hasil pemikiran semata, yang terkadang muncul kesalahan dan kealpaan. Sedangkan resiko dalam hal akidah berakibat

[illegible]

Tasawuf model al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi diharapkan umat akan dinamis dan dapat mensandingkan antara kenikmatan bertemu dengan Tuhan dan sekaligus menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi manusia, seperti yang ditunjukkan oleh wali songo yang menyebarkan Islam di Indonesia. Dengan model tasawuf yang moderat memungkinkan umat islam secara individu memiliki hubungan langsung dengan Tuhan dan secara berjamaah dapat melakukan gerakan kebaikan umat, sehingga menjadikan umat memiliki kesalehan individu dan kesalehan sosial.²⁵⁹

Berdirinya Nahdlatul Ulama sebagai organisasi tidak lepas dari pengaruh kondisi politik saat itu. Langkah yang diambil para ulama pesantren

²⁵⁹ <http://aswaja-nu.blogspot.com/2009/07/aswaja-ala-nu.html/> Najib Burhani

up kelangsungan tradisi Islam tradisional yang her modernis dengan dalih bahwa tradisi yang dilak sionalis adalah *bid'ah* dan *tahayul* yang tidak te al-Hadith. *Kedua*, dalam skala internasional N kepentingan Muslim bermazhab untuk tetap r bermazhab terhadap tekanan kerajaan Arab an untuk menerapkan faham wahabinya. Keberac telah mampu menunjukkan eksistensi diri al sejak dini. Dampak lain yang ditimbulkan ole organisasi adalah semakin meningkatnya pemahan tingnya berorganisasi sehingga keberadaan u

up kelangsungan tradisi Islam tradisional yang her modernis dengan dalih bahwa tradisi yang dilak sionalis adalah *bid'ah* dan *tahayul* yang tidak te al-Hadith. *Kedua*, dalam skala internasional N kepentingan Muslim bermazhab untuk tetap n bermazhab terhadap tekanan kerajaan Arab an untuk menerapkan faham wahabinya. Keberac telah mampu menunjukkan eksistensi diri al sejak dini. Dampak lain yang ditimbulkan ole organisasi adalah semakin meningkatnya pemahar tingnya berorganisasi sehingga keberadaan u

Di sisi lain NU harus bisa menjaga kepentingan negara secara lebih makro, saat itu masyarakat pada posisi bingung oleh gelar Imam Negara

[illegible]

Islam Indonesia (NII) Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo. Nu sendiri ingin sekali menggunakan pendekatan nonmiliter untuk melawan pemberontakan Darul Islam sehingga akhirnya memutuskan untuk menggunakan hukum Islam tersebut.

Implikasi dari inisiatif dan sebagai pendukung utama Musyawarah Alim Ulama Indonesia terhadap NU yaitu; diterimanya tuduhan dari politisi yang berposisi terhadap Soekarno maupun lawan partai politik NU saat itu bahwa para ulama khususnya dari NU sebagai inisiator gagasan tersebut hanya “menjilat” presiden dengan menjual agamanya. Bahkan kaum modernis (yang tergabung dalam Masyumi) terutama pimpinan Masyumi, langsung menentang keputusan tersebut, yang menyatakan tidak sah dan merupakan penggunaan fiqih untuk motifasi politik. Tuduhan lainnya, NU dianggap lebih mendahulukan kepentingan politik dan sosial ekonomi jangka pendeknya dibandingkan kepentingan perjuangan umat Islam pada umumnya untuk membentuk negara yang didasarkan atas hukum Allah.

Sebaliknya politisi yang netral malah memuji keberanian NU mencantumkan status “dharuri” yang berarti menilai bahwa Presiden Soekarno belum sempurna memenuhi syarat , baik secara agama maupun politik, karena belum dipilih melalui pemilihan umum. Efek lainnya adalah bahwa konferensi 1954 tersebut mendapat sambutan baik dari Presiden, yang selama ini tidak pernah menganggap konferensi–konferensi ulama sebagai peristiwa penting, pada upacara penutupannya diadakan secara mewah bagi para utusan ditempat kediaman presiden, di Cipanas.

Dengan dibukanya kran reformasi untuk memberi kebebasan kepada semua organisasi menjadi partai politik, termasuk diantaranya NU, memberikan peluang bagi warga Nahdliyyin untuk ikut berkompetensi dalam percaturan politik meskipun bukan atas nama NU secara langsung, namun dengan penunjukan PKB sebagai partai berlatar belakang NU, juga PKNU, PNU, telah menjadikan NU seakan-akan tidak konsisten dengan konsep Kembali ke Khittah 1926-nya. Namun berpegang pada Sembilan pedoman politik NU sebenarnya perihal tersebut tidak menyalahi aturan dan

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sikap *tawassuť* yang dipilih oleh Nahdlatul Ulama' berawal dari nilai-nilai teologi ash'arisme yang tidak terlalu ekstrim kanan, dalam terminologi radikalisme, atau kiri, dari tradisi liberalisme. Tawasut Nahdlatul Ulama' adalah sikap moderatisme yang memberikan ruang dialog terbuka kepada pemikiran yang berbeda-beda.
2. Kondisi sosial, kelahiran NU ditandai dengan merebaknya kekuatan sosial baru yang hadir di Indonesia, semisal para pembaharu Islam dan kelompok Wahabi. Begitu halnya di bidang keagamaan, kebiasaan masyarakat Jawa untuk menjaga tradisi yang sangat kuat, dihantui oleh isu purifikasi keyakinan. Di bidang politik, kelompok-kelompok tradisional Islam mulai disingkirkan oleh kaum muda. Oleh sebab itulah NU hadir sebagai pemberi jalan tengah, yang ingin tetap menjaga keutuhan nilai tradisi dan tidak alergi untuk memperbaharui pemikiran Islam.
3. Program atau kebijakan NU dan implikasi *tawassuť* dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu, sosial, keagamaan, dan politik. *Bidang Sosial*, NU lebih mengedepankan cara-cara yang elegan dalam berdakwah, tidak memaksakan kehendak. Sedangkan di sisi pendidikan, NU memadukan tradisionalisme pesantren dan pendidikan umum. Di *Bidang Keagamaan*,

1. Keterbatasan peneliti dalam mengkaji NU dari sudut kemoderatan atau *ke-tawassut*-annya membutuhkan penelitian lebih lanjut guna memperkokoh pemahaman generasi Nahdliyyin khususnya dan generasi Islam pada umumnya tentang ajaran *Aswaja* ala NU secara proporsional.
2. NU sebagai organisasi *diniyyah* mempunyai segudang potensi, peluang, kelemahan dan tantangan di dalamnya beribu keunikan tersembunyi tentu membutuhkan kajian lebih mendalam guna mengekskiskan ajaran *Aswaja*.
3. Jika saat berdirinya NU dilatarbelakangi sikap *tawasut*-nya diantara berbagai kelompok yang ada saat itu, maka tantangan yang dihadapi NU sekarang jauh lebih kompleks karena NU dikepung berbagai kelompok Islam berjenis lain dan juga globalisasi dunia, maka sikap moderat NU

DAFTAR PUSTAKA

- A. Nasir, Salihun, *Pemikiran Kalam (Teologi Islam: Sejarah, Ajaran dan Perkembangannya)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010)
- Abbas, Sirajuddin, *I'tiqod Ahlussunnah Wal Jamaah*, (Jakarta, Pustaka Tarbiyah Baru, 2010).
- Abdul Aziz, Aceng. dan Muchtar, M. Najdid, *Islam ahlussunnah Waljama'ah di Indonesia; Sejarah, Pemikiran, dan Dinamika Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Pustaka Ma'arif Nahdlatul Ulama, 2007).
- Abdul Fatah, Munawir, *Tradisi Orang-Orang NU*, (Jogjakarta,Pustaka Pesantren, 2006).
- Abdullah, Amin, "Islam Berkemajoean" (Makalah Milad Muhammadiyah di Jogjakarta Tahun 2013).
- Abdussomad, Muhyiddin, *Aqidah Ahl Sunnah wa al-Jama'ah* (Surabaya, Kalista, 2009)
- , *Hujjah NU: Aqidah, Amalia, Tradisi* (Surabaya, Kalista, 2007)
- Abu Zahrah, Muhammad, *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam* (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2011),
- Agil Siraj, Said, *Ahlussunnah wal Jama'ah Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta, LKPSM, 1997),
- Akarhanaf ,; *Kyai Hasyim Asy'ari, Bapak Umat Islam Indonesia*. (Jombang: pondok Pesantren Tebu Ireng, 1949)
- Ali, As'ad Sa'id. *Pergolakan di Jantung Tradisi NU yang Saya Amati*. (Jakarta: LP3ES, 2008).
- Alwy, Ahmad Syubbanuddin ,*Dari Kiai Kampung ke NU Miring*, (Yogyakarta, Arruz Media),
- Amin Imron, Fuad, *Syaikhona Kholil Bangkalan, Penentu berdirinya NU* (Surabaya, kalista, 2012),
- Amrullah, Abdul Karim, "*Studi Komparasi Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Bashori Alei tentang Motif Menulis dan Kontribusinya bagi Pengembangan Pesantren*", (Tersis, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004).
- Anam, Choirul, *Pemikiran K.H Achmad Siddiq* (Jakarta, Duta Aksara Mulia, 2010).

- Arif, Syaiful, *Dari Kiai Kampung ke NU Miring*, (NU Pasca-Kebudayaan) (Yogyakarta, Arruz Media),
- , *Nahdlatul Ulama, Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan (Politik NU Pascapilpres)*, (Jakarta: Kompas, 2010),
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995),
- , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991),
- , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Asy'ari, Hasyim, *Risalah Ahl al-Sunnah wal Jamāah fi Ḥadīth al-Mawtā wa Ashraf al- Sā'ah Bayān Mafhum al-Sunnah wa al-Bid'ah* (Jombang: Maktabah al-Turath al-Islāmi, 1415H),
- Asyari, Saudi, *Nalar Politik NU dan Muhammadiyah*, (Yogyakarta, LKis, 2010)
- Asy-Syahrastani, *Al-Milal wa al-Nihal*, (Surabaya, Bina Ilmu, 2006),
- Aziz, Munawir, Nahdlatul Ulama, *Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan; Mengelola Syahwat Politik NU* (Jakarta, Kompas, 2010),
- Barton, Grez, *Biografi Gus Dur, The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, (Yogyakarta, LKiS, 2002),
- Baso, Ahmad, *Agama NU untuk NKRI* (Jakarta pustaka afid, 2013)
- , *NU Studies: Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalism Islam dan Fundamentalism Neo-Liberal* (Erlangga, 2006)
- Bisri, Mustofa, dalam pengantar Abdurrahman wahid, *Membaca Sejarah Nusantara* (Yogyakarta, LKiS, 2010),
- Bruinessen, Martin Van, *Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat* (Bandung: Mizan, 1995).
- Burhanudin, Tamyiz, *Akhlaq Pesantren: Pandangan KH. M. Hasyim Asy'ari* (Ittaqa Press, 2001)
- Dhafir, Zamaksari, *Tradisi Pesantren : Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta, LP3ES, 1982)
- Dy., Aceng Abdul Aziz dan M. Najdid Muchtar. *Islam ahlussunnah Waljama'ah di Indonesia; Sejarah, Pemikiran, dan Dinamika Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Pustaka Ma'arif Nahdlatul Ulama, 2007.

- El-Guyani, Gugun, *Resolusi Jihad paling Syar'i*, (Yogyakarta, Pustaka Pesantren 2010),
- Fadeli Soelaiman dan Muhammad Subhan, *Antologi NU Buku I, (Sejarah, Istilah, Amaliyah, Uswah)*, (Surabaya, Kalista, 2010)
- , *Antologi NU Buku II, Sejarah, Istilah, Amaliyah, Uswah*, (Surabaya, Kalista, 2010),
- Fatah, Munawir Abdul, *Tradisi Orang-Orang NU*, (Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2006),
- Fealy, Greg & Antony Bubalo. *Jejak Kafilah*. terj. Akh. Muzakki (Bandung; Mizan, 2001),
- Fealy, Greg, *Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967*, (Yogyakarta, LKiS, 2011),
- Gifford, Paul, "Authority of Religions" dalam *Routledge Companions to Study of Religion* ed. John Hinnels (London and New York; Taylor & Francis e-Library, 2005),
- Hakim, Lukman. *Perlawanan Islam Kultural; Relasi Asosiatif Pertumbuhan, Civil Society, dan Doktrin Aswaja NU*, (Surabaya: Pustaka Eureka, 2004)
- Haris, Busyairi, *Islam NU (Pengawal tradisi Sunni Indonesia)*, (Surabaya: Pustaka Eureka, 2010).
- Hikam, Muhammad AS., *Demokrasi dan Civil Society* (Jakarta, LP3ES, 1996),
- Hilmy, Masdar, Moderatisme Muhammadiyah dan NU dalam Konteks Keindonesiaan (makalah yang diposting di website pasca sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya)
- <http://myqolam.wordpress.com/2011/07/26/existensi-faham-alussunnah-wal-jama%E/Akhyar>
- <http://gusmus.net/page.php?mod=dinamis&sub=10&id=69/> Tawassuth dan Tatharruf /A. Mustofa Bisri
- Idrus Ramli, Muhammad, *Mazhab Al- Asy'ari, Benarkah Ahlussunnah wal-Jama'ah*, (Surabaya: Khalista, 2009).
- , *Pengantar Sejarah Ahlussunnah wal-Jama'ah*, (Surabaya: Khalista, 2010).
- Imron, Fuad Amin, *Syaikhona Kholil Bangkalan, Penentu berdirinya NU* (Surabaya, kalista, 2012), 137

- Karim Amrullah, Abdul, “Studi Komparasi Kiai Hasyim Asy’ari dan Kiai Bashori Alei tentang Motif Menulis dan Kontribusinya bagi Pengembangan Pesantren”, (Tersis, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004).
- Laode Ida, *NU Muda, Kaum Progresif dan Sekulerisme Baru*, (Jakarta, Erlangga, 2004),
- LTN PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010* (Surabaya, Kalista 2011),
- M. Amin Nurdin, Afifi Fauzi Abbas, *Sejarah Pemikiran Islam* (Jakarta, Amzah, 2012),
- Mahmud Shubhi, Ahmad, *Fi Ilm al Kalam*, (Kairo: Dar al-Nahdhah, 1965),
- Maman, U. dkk, *Metode Penelitian Agama* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006)
- Mas’ud, Abdurrahman. *Dari Haramain Sampai ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*. Jakarta: Prenada Media, 1996.
- Misrowi, Zuhairi, *Menggugat Tradisi Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU*, (Jakarta, Kompas 2004)
- Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Muchid Muzadi, Abdul, *Mengenal Nahdlatul Ulama* (Surabaya, Kalista, 2006),
- , *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajarannya* (Surabaya, Kalista, 2007),
- Muchtar, Masyhudi. “Detik-Detik Lahirnya Wilayah NU Jawa Timur”, *Aula*, no. 2, Februari 1987.
- Mughis, Abdul, *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008),
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- Muhsin, Imam, dkk, *Sejarah Islam Lokal*, (Yogyakarta, Teras 2009)
- Munir Amin, Samsul , *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta, Amzah, 2010)
- Muṣṭafa Abdul Raziq, *Tamhīdli Tarikh al-Falsafah al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, 1959)
- Muthohar, Ahmad, *Teologi Islam, Konsep Iman antara Mu’tazilah dan Asy’ariyyah*, (Yogyakarta, Teras, 2008),

- Muzadi, Abdul Muchid, *Mengenal Nahdlatul Ulama* (Surabaya, Kalista, 2006)
- , *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajarannya* (Surabaya, Kalista, 2007)
- Nasution, Harun, *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah, Analisa Perbandingan*, (Jakarta, UI Press, 2011)
- , *Teologi Islam* (Jakarta UI Press, 2011),
- Ni'am, Syamsun, *Wasiat Tarekat Hadratus Syaikh hasyim Asy'ari* (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2011),
- Nurdin, M. Amin, Afifi Fauzi Abbas, *Sejarah Pemikiran Islam* (Jakarta, Amzah, 2012),
- Pengantar LTN PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas, Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010* (Surabaya, Kalista 2011),
- Qamar, Mujamil, *NU "Liberal": dari Tradisinalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam*. (Bandung: Mizan, 2002).
- Qordowi, Yusuf, *Meluruskan Sejarah Umat Islam*, (Jakarta, Srigunting, 2009)
- Rahardjo, Dawam (ed). *Pesantren dan Pembaruan* (Jakarta, LP3ES, 1995)
- Ramli, Muhammad Idrus, *Mazhab Al- Asy'ari, Benarkah Ahlussunnah wal-Jama'ah*, (Surabaya: Khalista, 2009).
- , *Pengantar Sejarah Ahlussunnah wal-Jamaah*, (Surabaya, Kalista, 2011)
- Raziq, Abdul, *Tamhīdli Tarikh al-Falsafah al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Arabiyah, 1959),
- Ridwan, Nur Kholiq, *NU dan Bangsa 1914-2010; Pergulatan Politik dan Kekuasaan* (Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2010),
- Rosyid, Ikhsan dkk., *Sarung dan Demokrasi, dari NU untuk Peradaban Keindonesiaan; NU dan Islamisasi Kultural* (Surabaya, Kalista, 2008),
- Rouf, Abdur, *NU dan Civil Islam di Indonesia* (Tangerang: PT. Intimedia Cipta Nusantara, 2010),
- Saprillah, *Dari Kiai Kampung ke NU Miring*, (Yogyakarta, Arruz Media),
- Siddiq, Achmad, *Khittah Nahdliyyah* (Surabaya, Kalista, 2006),

- , *Pedoman Berfikir Nahdlatul Ulama*, (Djember: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Cabang Djember, 1969),
- Siraj, Said Agil, *Ahlussunnah wal Jama'ah Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta, LKPSM, 1997),
- Soejono dan Rahman, Abdul, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999),
- Solichin, Salam, *K.H. Hasyim Asy'ari Ulama Besar Indonesia*. (Jakarta: Djaja Murni, 1963)
- , *Sekitar Walisanga*, (Kudus: Menara Kudus, 1964),
- Suaidi, Asyari, *Nalar Politik NU dan Muhammadiyah* (Yogyakarta, LKiS, 2010),
- Sufyan, *Sarung dan Demokrasi, dari NU untuk Peradaban Keindonesiaan; NU dan Islamisasi Kultural* (Surabaya, Kalista, 2008),
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunanto, Musrifah, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia, Jakarta; Rajawali Press, 2010*,
- Surahno, *Dari Kiai Kampung ke NU Miring, (Booming Nahdliyyin)* (Yogyakarta, Arruz Media), 204
- Syaiful Arif, *Dari Kiai Kampung ke NU Miring, (NU Pasca-Kebudayaan)* (Yogyakarta, Arruz Media),
- , *Nahdlatul Ulama, Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan (Politik NU Pascapilpres)*, (Jakarta: Kompas, 2010),
- Van Bruinessen, Martin, *Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat* (Bandung: Mizan, 1995).
- , Martin, *NU Tradisi Relasi-relasi Kuasa* (Jogjakarta: LKiS, 1994),
- Wahid, Salahuddin, *Menggagas NU Masa Depan* (Jombang, Pustaka Tebuireng, 2010),
- Wahid, Abdurrahman, *Kiai Bisri Samsuri: Pecinta Fiqih Sepanjang Hayat*, (Jakarta: Majalah Amanah, 1989),
- Wahyudi, Chafid, "NU dan Civil Religion", dalam *Antologi Kajian Islam*, ed. M Ridwan Nasir, et.al (Surabaya, Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, 2011),
- Wasid, *Gus Dur Sang Guru Bangsa; Pergolakan Islam, Kemanusiaan dan Kebangsaan*, (Yogyakarta, Interpena, 2010)

